



MAJALAH

# Parlementaria

EDISI 205 • TH. 2022



## Karut-Marut Tata Kelola Batu Bara

Wajah kusut pengelolaan batu bara  
sudah tersingkap.  
Selain membenahi manajemen,  
EBT dianggap jadi obat manjur  
atasi ketergantungan terhadap batu-bara



7 25272 73070 6

## PENGANTAR REDAKSI

**K**ementerian ESDM menegaskan larangan ekspor batu bara terhitung 1-31 Januari 2022. Hal tersebut seakan 'rem dadakan' yang mengejutkan berbagai pihak. Karena pemerintah berupaya menekan para perusahaan batu bara agar segera memenuhi kewajiban memasok produksi batu bara dalam negeri. Namun, hanya berumur 11 hari, pelarangan tersebut lambat laun dianulir sendiri oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno pun memberi penjelasan yang mengejutkan, dimana, Dirut PLN yang kala itu masih dijabat oleh Zulkifli Zaini pada Agustus 2021 mengatakan bahwa cadangan batu bara untuk pasok PT PLN hanya bertahan enam hari saja.

Banyak yang harus dibenahi, terutama dari sisi manajerial energi yang bersumber dari fosil tersebut. Selain harus berbenah, langkah yang harus segera diambil adalah menyegerakan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT)

Atas dasar itu pula, 'Karut Marut Tata Kelola Batu Bara' diangkat menjadi tema besar pada **Majalah Parlementaria 205**. Berbagai pandangan dari anggota dewan dihadirkan, sebagai masukan demi perbaikan sektor energi dalam negeri.

Di Rubrik Pengawasan, Tim Redaksi menurunkan membahas penggabungan lembaga penelitian kementerian dan lembaga ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selaku mitra kerja, Komisi VII meminta agar penggabungan tersebut tidak menimbulkan kegaduhan baru.

Selanjutnya di Rubrik Anggaran, Tim Redaksi membahas mengenai PEN 2022 yang harus dimaksimalkan untuk perlindungan sosial. dan di Rubrik Legislasi, membahas mengenai RUU SKN yang harus mengakomodir kesejahteraan untuk mantan atlet.

Masih banyak lagi yang disajikan **Tim Redaksi Parlementaria** seperti rubrik Sorotan, Liputan Khusus, kemudian berita mengenai kegiatan Anggota DPR RI di dapilnya dalam rangka melaksanakan amanat konstitusinya sebagai wakil rakyat. Semuanya disajikan secara komprehensif sehingga sangat layak untuk dibaca.

Selamat membaca!

*Parlementaria*



ILUSTRASI COVER: CHEEDAR



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI  
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR\_RI



@DPR\_RI



DPR RI

www.dpr.go.id



# Parlementaria

## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

## PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak dan Media Sosial)

## W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

## REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

## REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

## SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds,  
Prima Danutirto, A.Md

## ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P,

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,

Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli,

Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,

Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah,

Nafisa Hanum Alaydrus

## FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno

PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldi Opie, Hasri Mentari,

Friederick Munchen

## ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti

Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki

Nugraha, Sunarya, Fahni Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita

## INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

## ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, SE

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa,

Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



# Parlementaria

EDISI 205 • TH. 2022



7



22



30



78

4	DINAMIKA PARLEMEN	28	FOTO STORY
	Rencana Penghapusan Tenaga Honorer	30	PROFIL
5	MIMBAR DEMOKRASI		Lodewijk Fredrich Paulus : "Pengabdian Seorang Prajurit"
	Pelaku UMKM Burung Walet Sulit Pasarkan Produk Ke Luar Negeri	34	KUNKER
6	PROLOG	56	SOROTAN
	Karut-Marut Tata Kelola Batu Bara		Ciptakan Stabilitas Harga Minyak Goreng
	LAPORAN UTAMA	58	LIPUTAN KHUSUS
8	Krisis Batu Bara: Masih Terperosok dalam Lubang yang Sama		Fadli Zon : Bali Siap Jadi Tuan Rumah IPU
10	Sebagai Pemanfaat, PLN Harus Perbaiki Manajemen Tata Kelola	60	DAPIL
12	Cegah Krisis, Perkuat Pengawasan DMO	70	TOKOH
18	SUMBANG SARAN		Gusti Ngurah Anom : "Kisah Inspiratif Pemilik Toko Krisna Bali"
	Menakar Tata Kelola Batu Bara	72	PERNIK
20	PENGAWASAN		Perayaan Natal Parlemen Cermin Kekuatan, Kerukunan dan Gotong Royong
	Penggabungan Lembaga Riset ke BRIN Jangan Ciptakan Masalah Baru	74	KIAT SEHAT
22	ANGGARAN		Sehat Di Masa Kritis
	PEN 2022, Maksimalkan Untuk Perlindungan Sosial	76	WISATA
24	LEGISLASI		Rumah Pengasangan Bung Karno di Bengkulu
	RUU SKN: Akomodir Kesejahteraan Mantan Atlet	78	HOBİ
26	FOTO BERITA		Arzetti Bilbina : Selalu Menyempatkan Diri Berolahraga
		79	POJOK PARLE
			Dilarang Main Hukum dan Main Hakim Sendiri

# RENCANA PENGHAPUSAN TENAGA HONORER

**Penghapusan Tenaga Honorer per 2023** diatur dalam PP 49/2018. Pegawai Non-PNS yang ada di instansi pemerintah menyelesaikan tugas paling lama 2023. Kedepan, **pegawai pemerintah hanya dua**, yaitu **PNS dan PPPK**. Larangan untuk rekrut tenaga honorer ini sudah berlaku sejak terbit PP Nomor 4/2005, bahwa Pemda dilarang rekrut tenaga honorer. Perekurutan tenaga kebersihan dan keamanan melalui **outsourcing dengan biaya umum**

**400 Ribu** Orang  
Tenaga Honorer di  
Indonesia

\*Deputi Bidang SDM  
Aparatur Kemen-PANRB, Jumat  
(21/1/2022)



**120 Ribu**  
Tenaga  
Pendidik



**4 Ribu**  
Tenaga  
Kesehatan



**2 Ribu**  
Tenaga  
Penyuluh

"Banyak yang sudah mengabdikan puluhan tahun. Jangan sampai menimbulkan masalah baru, yakni tak tertanganinya pelayanan publik"

**Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra,  
Muhaimin Iskandar**



"Ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya"

**Arif Wibowo,  
Komisi II DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan**



"Nasib tenaga honorer ini harus memiliki kepastian status. Jangan sampai mereka ditelantarkan dan tidak diberi kesempatan menjadi ASN"

**Aminurokhman,  
Komisi II DPR RI Fraksi Partai Nasdem**



# PELAKU UMKM BURUNG WALET SULIT PASARKAN PRODUK KE LUAR NEGERI

**Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Burung Walet** menyampaikan aspirasinya ke DPR RI yang diterima oleh Anggota DPR RI Komisi VI dan IV Fraksi PKB. Pelaku usaha tersebut terhimpun dalam satu organisasi, yaitu Asosiasi Peternak Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI).

**Mereka menjelaskan Indonesia** memiliki potensi usaha burung walet yang luar biasa belum optimal. Rata-rata per tahun, ekspor burung walet Indonesia hanya 1.500 ton. Permintaan dunia, khususnya dari Tiongkok, hingga mencapai 5000 ton/tahun. Usaha sarang burung walet padat karya, tidak bisa gunakan mesin karena terkait ketelitian dalam proses, misalnya pencabutan bulu dan pembersihan kotoran dari sarang.

**Sejak 2012**, Indonesia miliki MoU dengan Tiongkok terkait ekspor sarang walet MoU tersebut sulit diikuti UMKM sarang walet di Indonesia karena perlu penyesuaian standardisasi. Standar membangun tempat penampungan sarang walet sebesar Rp 20 miliar. Termasuk perizinan sangat sulit. Hanya perusahaan besar Indonesia yang bisa ekspor langsung ke Tiongkok dengan hanya 245 ton. Ratifikasi MoU berupa Permendag tidak berpihak kepada pelaku UMKM.



## Tanggapan Dewan:



### 1. Tommy Kurniawan (Komisi VI):

Berkomitmen untuk selesaikan persoalan ini untuk memajukan UMKM dan pengusaha lokal. Sarang walet ini perlu diolah lebih jauh sebelum diekspor, agar memiliki nilai tambah produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

### 2. Siti Mukarromah (Komisi VI):

Akan mengevaluasi Permendag tersebut dalam rapat bersama mitra. Perlu pula dilakukan standardisasi agar produk sarang walet dari Indonesia tidak dibedakan dari Malaysia.

### 3. Daniel Johan (Komisi IV):

Meminta adanya data lebih detail terkait banyak pelaku usaha lokal yang terdampak atas kebijakan Permendag tersebut. Sehingga, informasi yang disampaikan dalam rapat bersama mitra bersifat valid, kuat, dan persoalan cepat selesai.





# Karut-Marut Tata Kelola Batu Bara

Wajah kusut pengelolaan batu bara sudah tersingkap. Selain membenahi manajemen, EBT dianggap jadi obat manjur atasi ketergantungan terhadap batu-bara.



Foto Ilustrasi: Tim Kunker Komisi VII DPR RI saat mengunjungi Kantor Terpadu PT Bukit Asam di Tarahan, Lampung. Foto: Rzk/Man



**AWAL** Tahun 2022, dunia pertambangan nasional diguncangkan dengan keputusan pemerintah menghentikan sementara ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022.

“Pil pahit” ini harus dialami oleh seluruh perusahaan pertambangan batubara, baik perusahaan swasta, maupun perusahaan plat merah alias BUMN. Hal itu menyusul defisit batubara yang dialami oleh PT PLN (Persero).

Defisit atau krisis ini terjadi akibat beberapa perusahaan pertambangan batu bara pemegang IUP (ijin usaha pertambangan), tidak menjalankan kewajiban DMO (domestic market obligation). DMO merupakan kewajiban mengalokasikan 25 persen dari total produksi batubara dalam setahun untuk kebutuhan batu bara dalam negeri, termasuk pasokan ke PLN.

Jika ekspor tetap dilanjutkan, maka

10 juta pelanggan PLN akan merasakan pemadaman listrik karena hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega Watt (MW) akan padam.

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai keluarnya kebijakan pelarangan (larangan ekspor batu bara) itu, seolah membuka wajah tata kelola batu bara kita yang ternyata carut marut. “Suatu yang ironi, bagi negara yang termasuk eksportir terbesar batu bara di dunia,” ungkap Yulian.

Tidak sampai dua pekan “sanksi” bagi perusahaan batubara itu diberlakukan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mencabut larangan ekspor tersebut.

Ia menyatakan ekspor batu bara dibuka kembali secara bertahap dengan melepas belasan kapal ekspor batu bara yang telah terverifikasi. Alasannya, stok cadangan batu bara ke PLN berangsur meningkat dan nantinya akan mengarah pada 25 hari.

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai, sebagai pemanfaat

batu bara terbesar, PT PLN harus memiliki rencana kerja yang benar terkait tata kelola batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Pasalnya, hal ini sudah pernah terjadi pula di beberapa tahun belakangan, yaitu pada tahun 2008 dan 2018.

Salah satu persoalan tata kelola yang harus diperbaiki PT PLN adalah kontrak bisnis yang hanya mengandalkan jangka pendek. Kalau kontraknya bersifat jangka pendek, maka perusahaan batu bara lebih memilih untuk melakukan ekspor daripada pemenuhan dalam negeri karena harga di dunia internasional memang tinggi.

“Sedangkan PLN tidak mampu berkompetisi secara kontrak bisnis jangka panjang, itu satu kelemahannya di PLN,” urainya.

Terlepas dari berbagai krisis batu bara dalam negeri tersebut, sejatinya Indonesia sepakat untuk mengurangi penggunaan batu bara. Pasalnya selama ini batu bara diyakini sebagai penyumbang yang cukup besar bagi kerusakan lingkungan.

Padahal Indonesia memiliki target zero emission pada tahun 2060 dengan meninggalkan energi fosil. Setelah sebelumnya ikut meratifikasi Paris Agreement dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan iklim.

Tak berlebihan jika kemudian Ketua Komisi VII, Sugeng Suparwoto kembali menegaskan Komisi VII berkomitmen untuk terus mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan.

Bahkan DPR pun mendukung penuh rencana pemerintah mensubstitusi liquid petroleum gas (LPG) dengan dimethyl ether (DME), khususnya untuk penggunaan rumah tangga. DME salah satunya berasal dari Batubara kalori rendah yang digasifikasikan.

DME diyakini selain menghasilkan nyala api yang lebih biru dan stabil. DME juga mudah terurai di udara sehingga tidak merusak lapisan ozon. Serta Tidak menghasilkan polutan particulate matter (PM dan Nitrogen Oksida) (NOx). ● **tim**



# Krisis Batu Bara: Masih Terperosok dalam Lubang yang Sama

Seakan tidak belajar dari sejarah, kasus krisis pasokan batu bara kepada PT PLN kembali terjadi. Per 31 Desember 2021 silam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) resmi mengeluarkan Surat Dirjen Minerba bernomor B-1611/MB.05/DJB.B/2021 yang menyatakan larangan ekspor batu bara hingga 31 Januari 2022. Larangan itu muncul diduga lantaran beberapa perusahaan batu bara tidak mengikuti ketentuan kewajiban pemenuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) sebesar 25 persen dari total produksi.



**DAMPAK** defisit pasokan batu bara itu tidak main-main. Muncul ancaman pemadaman listrik (black out) di Pulau Jawa dan Bali karena

aliran listrik PT PLN tidak didukung oleh pasokan energi yang memadai. Tercatat, akan ada 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total

daya sekitar 10.850 Mega Watt (MW) terancam padam jika pasokan batu bara tidak kunjung terpenuhi.

Namun, nahas, ternyata kebijakan larangan ekspor batu bara tersebut hanya berumur sebelas hari. Atas nama relaksasi kebijakan, pemerintah bertahap melepas belasan kapal ekspor batu bara yang telah terverifikasi.

Penjelasan Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno pun lebih mengejutkan. Bahwa informasi akan terjadinya defisit batu bara sudah disampaikan Dirut PLN

yang kala itu masih dijabat oleh Zulkifli Zaini pada Agustus 2021. Menurutnya, cadangan batu bara untuk pasok PT PLN hanya bertahan enam hari saja.

“Satu hal yang sangat khawatirkan mengingat PLN sebagai institusi yang membeli semua listrik yang ada di Indonesia yang memiliki pembangkit besar yang ada di Indonesia,” ujar Eddy dalam sebuah diskusi akhir Januari lalu.

Eddy menjelaskan Kementerian ESDM memiliki target batu bara kurang lebih 650 juta produksi batu bara,





dengan jumlah batu bara yang menjadi DMO sebesar 135 juta ton. Sehingga, menurut Eddy, kebutuhan pasokan batu bara untuk kebutuhan nasional sudah terpenuhi. “Pertanyaannya kenapa PLN bisa kekurangan di saat DMO terpenuhi? Permasalahannya bukan pada DMO. Memang diakui ada yang nakal, tidak peduli, *ngemplang* DMO masih ada,” jelas Eddy.

Karena itu, menurutnya, adalah suatu hal yang wajar jika perusahaan batu bara tersebut lebih mementingkan aspek ekspor ketimbang pemenuhan DMO. Sebab, saat dua tahun lalu harga batu bara di pasar internasional jatuh, para produsen emas hitam tersebut berbondong-bondong menjualnya ke PT PLN. Namun, di saat harga internasional meroket hingga US\$ 280 per ton pada akhir 2021, eksportir batu bara ini lebih memilih untuk menjualnya ke luar negeri ketimbang menjualnya ke PT PLN dengan harga US\$ 70 per ton.

Disparitas harga yang sangat signifikan inilah yang diduga menjadi alasan beberapa perusahaan produsen batu bara untuk mengabaikan aturan DMO tersebut.

### REWARD-PUNISHMENT

Dalam catatan Kementerian ESDM, dari 578 perusahaan yang lakukan kegiatan penambangan, hanya 47 perusahaan yang mampu penuhi ketentuan DMO lebih dari 100 persen, sisanya 32 perusahaan mampu penuhi DMO rentang 75-100 persen, dan 25 perusahaan hanya memenuhi DMO rentang 25-75 persen.

Kemudian, terdapat 17 perusahaan yang memenuhi DMO rentang 25-50 persen, 29 perusahaan yang memenuhi DMO rentang 1-25 persen. Sisanya, 428 perusahaan produsen batu bara 0 persen penuhi ketentuan DMO. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, apabila ada pemilik material batu bara yang tidak bisa memenuhi DMO, maka pemerintah tidak akan mengizinkan kapal-kapal logistik yang memuat batu bara itu berlayar ke luar negeri.

**“PERTANYAANNYA KENAPA PLN BISA KEKURANGAN DI SAAT DMO TERPENUHI? PERMASALAHANNYA BUKAN PADA DMO. MEMANG DIAKUI ADA YANG NAKAL, TIDAK PEDULI, NGEMPLANG DMO MASIH ADA”**

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.  
Foto: Ojirni



Sedangkan, untuk perusahaan yang memiliki DMO sudah lebih dari 100 persen, maka dapatkan pelonggaran izin agar kapal-kapal logistiknya dapat melakukan ekspor ke luar negeri. Atas dasar *reward and punishment* itulah, pemerintah mendapatkan stok batu bara tambahan sebanyak 5,1 juta ton.

Meskipun demikian, Eddy Soeparno ingatkan bahwa dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 tahun 2009, disebutkan tentang aturan kewajiban DMO. Namun, kewajiban DMO tersebut hanyalah untuk empat hal, yaitu sektor pembangkit listrik, sektor industri, sektor usaha kecil, dan sektor rumah tangga (Pasal 4 poin 5). “Tidak ada tertulis ada DMO khusus untuk PLN,” jelas Eddy.

Sehingga, menurut Eddy, sepanjang perusahaan penambang batu bara sudah memenuhi persyaratan minimum DMO tersebut untuk kebutuhan dalam negeri, tanpa harus menjual ke PLN yang memiliki harga pembelian hanya US\$70 per ton, perusahaan tersebut sudah dapat disebut bebas dari kewajiban pemenuhan DMO tersebut. Terlebih menjualnya ke anak perusahaan PT PLN, yaitu PLN Batu Bara yang dinilai akan sangat rugi ketimbang ekspor.

Dalam kaitan itulah, maka Anggota Fraksi PAN DPR RI ini mendorong agar PT PLN mampu fokus dalam perbaikan manajemen kelistrikan. PLN tidak perlu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi dari perusahaan PLN Batu Bara selama ini, yaitu pembelian batu bara, mengurus kapal tongkang, pelabuhan dan sebagainya. Sebab, pasokan batu bara PT PLN selama ini sudah *sustainable* mendapatkan sumber dari lima sumber.

“Pertama, melalui PLN itu sendiri; Kedua, melalui PLN Batu Bara; Ketiga melalui PJB; Keempat, melalui Indonesia Power; Kelima sektor swasta,” jelasnya.

Dengan adanya *reward and punishment* serta perbaikan tata kelola manajemen PT PLN yang lebih baik, diyakini akan mampu mencegah adanya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia batu bara. Disinyalir para mafia batu bara ini sudah bertahun-tahun melakukan praktik penambangan dan penjualan ilegal batu bara. Sebab, para mafia batu bara ini mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sehingga terjadi krisis batu bara kepada PT PLN. ● rdn/es

# Sebagai Pemanfaat, PLN Harus Perbaiki Manajemen Tata Kelola

Energi listrik tanah air saat ini masih menjadi pengguna terbesar batu bara. Padahal, selain tidak bisa diperbarui, cadangan energi fosil dalam negeri cukup mengkhawatirkan.



Anggota Komisi VII DPR RI  
Lamhot Sinaga. Foto: Azka/mvl



**DALAM** catatan PT PLN (Persero) sampai pada tahun 2030, kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 99,2 Giga Watt (GW).

Diantaranya 45 persen atau sebanyak 44,7 GW masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Sementara, pembangkit gas 26 persen, PLTA 15 persen, PLTP 6 persen, PLTS 5 persen, PLT EBT 2 persen dan PLT EBT Base 1 persen.

Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai PT PLN harus memiliki rencana kerja yang benar terkait tata kelola batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri. Peralnya, hal ini sudah pernah terjadi pula di beberapa tahun belakangan, yaitu pada tahun 2008 dan 2018.

Dikutip dari salah satu media nasional, pada tahun 2008, kenaikan produksi batu bara tertahan, bersamaan dengan terjadinya. Kenaikan produksi batu bara yang konsisten mencatatkan pertumbuhan, pada 2008 turun 5 persen menjadi 178,93 juta ton.

Pada 2018, Indonesia tercatat mengekspor 6 juta ton batu bara berkalori rendah 4.200 kkal ke Eropa, namun karena pertimbangan emisi, volume ekspor dikurangi secara signifikan. Selama ini pasokan utama batu bara kawasan ini berasal dari Rusia dan Kolombia. Namun pasokan dari dua negara ini juga tersendat karena tingginya permintaan.

Karena itu, tata kelola batu bara oleh PT PLN harus mampu mengatasi beberapa permasalahan yang ada di internal PLN saat ini. Pertama, ketidakmampuan PLN melakukan negosiasi bisnis dan membangun kerja sama dengan perusahaan batu bara untuk jangka panjang, sesuai rencana kerja PLN.



Kedua, jetty atau dermaga khusus kapal tongkang batu bara sering mengalami kerusakan, sehingga tidak optimal saat menerima pasokan batu bara melalui jalur laut. Ketiga, adanya perubahan cuaca yang tidak diantisipasi dengan baik oleh PLN dapat mempengaruhi situasi transportasi batu bara, termasuk saat penggalian batu bara di tambang.

Di sisi lain, PLN juga memiliki anak perusahaan yang khusus untuk mengelola batu bara, yaitu PT PLN Batu Bara. Dengan adanya anak perusahaan tersebut, seharusnya untuk kebutuhan pembangkit sudah well-managed. Namun, menurut Lamhot, internal manajemen PLN harus memegang kendali sampai ke anak perusahaan. “Sepertinya antara induk dan anak perusahaan berjalan sendiri-sendiri,” duga Lamhot.

### DIRUT BARU HARUS ATASI KRISIS BATU BARA

Pasca dilantiknya Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN di penghujung tahun 2021, Lamhot berharap persoalan krisis batu bara akibat minimnya pasokan dalam negeri dapat segera teratasi. Pasalnya, Darmawan Prasodjo bukanlah orang baru di tubuh PLN.

“Karena selama ini baru hitungan per bulan ya jabatannya direksi yang baru ini. Tetapi dirut yang baru ini kan dulunya kan wadirut. Mudah-mudahan dia bisa mengatasi semua ini,” harap Lamhot.

Selain itu, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN perlu aktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Sebab, jika merujuk di dunia internasional, para negara yang tidak menjadi produsen batu bara, tidak mengalami persoalan krisis dan ancaman pemadaman menyeluruh (black out).

“Bayangkan, PLN itu perusahaan yang sifatnya monopoli, bagaimana kalau tumbang? Dia punya kekuasaan mutlak menguasai listrik negara kita. Saya ingin mendesak, sudah tidak usah di-manjain PLN ini, super manja. Kalau pasokan batu bara ini sudah aman kembali, maka

**“TETAPI KALAU KONTRAKNYA JANGKA PANJANG, BERARTI PERUSAHAAN ITU AKAN TERIKAT. MAKANYA LAGI-LAGI SAYA BILANG BAHWA PERENCANAAN PASOKAN BATU BARA DI PLN ITU SANGAT KACAU. ITU YG PERLU DIBENAH PASCA KEJADIAN INI”**

kinerja PLN ini harus kita evaluasi,” tegas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Sudah menjadi tugas Kementerian BUMN untuk menjadikan PLN sebagai korporasi yang bekerja profesional. “Saya ingin menjadikan momentum ini menjadi pelajaran kepada PLN dan pemerintah. Supaya pemerintah tidak memanjakan PLN, itu intinya,” ujar Lamhot.

### DAMPAK EKONOMI-FISKAL LARANGAN BATU BARA

Di awal tahun 2022, pemerintah telah mengambil langkah pahit dengan mengorbankan devisa negara dalam rangka mengamankan pasokan listrik untuk masyarakat Indonesia. Pilihan sulit ini, hingga menghilangkan puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS) per bulan yang didapat hanya dari ekspor batu bara.

“Jadi mau tidak mau kita kehilangan puluhan miliar Dolar AS. Batu bara ini kan satu komoditas yang saat ini harganya sangat tinggi di market. Kalau hari ini kita bisa ekspor harusnya buat devisa banyak didapat, tetapi ini harus kita korbankan. Jadi ini langkah yang sangat pahit yang dilakukan pemerintah.

Langkah terakhir,” ujar Lamhot.

Dalam catatan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), kerugian lain yang dari adanya pelarangan ekspor batu bara ini adalah pemerintah akan kehilangan pendapat pajak dan non pajak (royalty). Sehingga, berdampak pada kehilangan penerimaan pemerintah daerah. Di sisi lain, larangan ekspor batu bara ini akan menciptakan ketidakpastian usaha, sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara.

Karena itu, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini meminta PT PLN untuk mengamankan pasokan batu bara, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Di samping pula, infrastruktur dasar, seperti dermaga khusus batu bara (jetty) dan sebagainya, harus diperhatikan. Sehingga, tata kelola batu bara harus diperhatikan sebaik mungkin. “Itu juga tata kelolanya harus diperbaiki semaksimal mungkin,” tegasnya.

Salah satu persoalan tata kelola yang harus diperbaiki PT PLN adalah kontrak bisnis yang hanya mengandalkan jangka pendek. Kalau kontraknya bersifat jangka pendek, maka perusahaan batu bara lebih memilih untuk melakukan ekspor daripada pemenuhan dalam negeri karena harga di dunia internasional memang tinggi.

“Sedangkan PLN tidak mampu berkompetisi secara kontrak bisnis jangka panjang, itu satu kelemahannya di PLN,” urainya.

Belajar dari polemik larangan ekspor ini, Lamhot mendesak pemerintah untuk lakukan kontrak bisnis jangka panjang dengan para perusahaan batu bara tersebut. Kalau terus dengan kontrak jangka pendek, maka sampai kapan pun akan terus alami defisit pasokan batu bara karena harga di pasar internasional lebih tinggi.

“Tetapi kalau kontraknya jangka panjang, berarti perusahaan itu akan terikat. Makanya lagi-lagi saya bilang bahwa perencanaan pasokan batu bara di PLN itu sangat kacau. Itu yg perlu dibenahi pasca kejadian ini,” tandas legislator dapil Sumatera Utara II ini. ● rdn/es

# Cegah Krisis, Perkuat Pengawasan DMO

Dinyatakan kritis, per 31 Desember 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menegaskan larangan ekspor batu bara terhitung 1-31 Januari 2022. Semacam 'rem dadakan' yang mengejutkan berbagai pihak, pemerintah berupaya menekan para perusahaan batu bara agar segera memenuhi kewajiban memasok produksi batu bara dalam negeri. Hanya berumur 11 hari, pelarangan lambat laun dianulir oleh pemerintah.



**SEBAGAI** negara yang dianugerahi oleh sumber daya alam yang melimpah, berdasarkan data yang dilansir dari Minerba One Data Indonesia

(MODI) KESDM per Sabtu (29/1/2022), produksi batu bara Indonesia mencapai 606,72 ton tahun 2021. Akan tetapi, jika angka produksi batu bara nasional tersebut disandingkan dengan realisasi ekspor dan realisasi *Domestic Market Obligation* (DMO), nilai ekspor jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai DMO.

Pada tahun 2021, total realisasi ekspor batu bara mampu mencapai hingga 315,17 ton, sedangkan total realisasi DMO hanya mencapai 63,47 ton. Padahal, pada tahun tersebut, pemerintah menargetkan penyerapan batu bara domestik sebesar 22,66 persen dari total produksi batu bara nasional. Jauh dari target yang ditentukan, beberapa kali PT PLN memberikan tanda krisis stok batu bara dalam negeri.

Kondisi ini seperti ini kerap terjadi ketika harga batu bara di pasar dunia

melambung jauh di atas batas harga jual dalam negeri (DMO). Di mana, harga DMO dipatok sebesar US\$ 70 per ton, sedangkan harga batu bara di pasar dunia terutama pada awal Oktober 2021 meroket hingga US\$ 280 per ton. Kesenjangan harga ini membuka potensi bagi perusahaan penambang batu bara untuk lebih memilih menjual batu bara ke pasar dunia dibandingkan menjual ke dalam negeri.

Jika dibiarkan berlanjut tanpa penangan, maka akan berdampak serius terhadap 10 juta pelanggan PLN, mulai dari masyarakat umum hingga industri yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Tidak hanya itu, akan ada 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan total daya sekitar 10.850 Mega Watt (MW) terancam padam jika pasokan batu bara tidak kunjung terpenuhi.

Diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara KESDM Ridwan Djamiludin menyampaikan, beberapa kali pemerintah telah mengingatkan para pengusaha batu bara untuk memenuhi komitmen memasok batu bara ke PLN. Namun, realisasinya pasokan batu bara setiap bulan ke PLN di bawah kewajiban persentase

penjualan batu bara untuk DMO.

Ia menjelaskan, dari kewajiban 5,1 juta metrik ton (MT) yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk para pengusaha batu bara hingga per tanggal 1 Januari 2022 hanya terpenuhi sebesar 35 ribu MT setara kurang dari 1 persen. Kewajiban yang ditentukan. Tentu, jumlah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan PLTU di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah melalui KESDM melakukan pelarangan ekspor batu bara periode 1 hingga 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B. Kebijakan 'rem dadakan' ini termuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

Hanya sampai 11 hari, kebijakan 'rem dadakan' ini perlahan dianulir oleh pemerintah sendiri. Dengan alasan, pasokan batu bara dianggap perlahan mulai terpenuhi. Anulir tersebut dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dirinya menyampaikan stok cadangan batu bara berangsur meningkat untuk 15 hari. yang nantinya akan mengarah pada 25 hari. Selain itu, ia menyatakan ekspor batu bara dibuka kembali secara bertahap dengan melepas belasan kapal ekspor batu bara yang telah terverifikasi.

Ketidaktegasan ini berdampak signifikan terhadap masalah sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Di sisi lain, hal ini turut menimbulkan pertanyaan untuk pemerintah, apakah pemerintah sanggup mengurus tata kelola batu bara guna menjaga pasokan listrik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Tanpa pembaharuan skema tata kelola batu bara yang jelas dan tegas di Indonesia akan mengakibatkan pasokan batu bara dalam negeri berada pada ambang kritis. Nantinya, krisis pasokan batu bara dalam negeri mengakibatkan penurunan produksi



listrik, yang mana memiliki konsekuensi adanya pemadaman bergilir ke jutaan pelanggan serta industri yang bergantung pada PLN.

### BENTUK BLU ATAU PERKUAT PENGAWASAN

Memahami kondisi tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menilai pemerintah dianggap belum mampu mengantisipasi ancaman krisis pasokan batu bara dalam negeri di Indonesia. Menurutnya, krisis ini berawal dari pemerintah yang tidak tegas mengawasi pengusaha batu bara untuk memenuhi DMO ke PLN sebanyak 25 persen dari total produksi dalam setahun.

“Keluarnya kebijakan pelarangan (larangan ekspor batu bara) itu, jadi membuka wajah tata kelola batu bara kita yang ternyata carut marut. Suatu yang ironis, bagi negara yang termasuk eksportir terbesar batu bara di dunia,” ungkap Yulian.

Walaupun dirinya bersyukur jika pemerintah berangsur mengatasi masa krisis tersebut, politisi Partai PDI-Perjuangan itu tidak setuju jika pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Pungutan Batu Bara. Berdasarkan informasi yang ia terima, melalui BLU Pungutan Batu Bara, harga batu bara yang sebelumnya dipatok pada harga US\$ 70 per ton, akan dilepas ke harga pasar.

Senada dengan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada Kamis (13/1/2022) lalu, ia menjelaskan, meskipun skema BLU memperkecil kesenjangan antara harga pasar dunia dengan harga DMO, akan tetapi menghadirkan BLU dalam tata kelola batu bara Indonesia akan semakin menambah beban negara, bahkan menimbulkan polemik.

Baginya, solusi membangun BLU Pungutan Batu Bara tidak menuntaskan krisis pasokan batu bara dalam negeri. Ia menerangkan jika BLU diterapkan, sejumlah masalah akan terjadi. Pertama, PLN terancam harus menalangi pembelian batu bara, karena BLU belum bisa mengumpulkan dana dari para

perusahaan batu bara.

Kedua, skema BLU batu bara berpotensi lebih menguntungkan pelaku usaha dibandingkan PT PLN. Mengingat iuran akan dikenakan bagi pelaku usaha, ada kemungkinan tidak akan bisa memperkecil kesenjangan antara harga pasar dunia dengan harga batu bara dalam negeri. Hal ini akan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik karena biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik oleh PLN pasti akan naik. Ketika BPP naik, maka akan ada dua pilihan yaitu antara tarif listrik naik atau kompensasi berupa subsidi naik.

Terakhir, jika pembelian harga batu bara harus mengikuti harga pasar maka akan melanggar ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 sekaligus UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. “Perlu ditegaskan bahwa undang-undang menegaskan harga batu bara untuk kepentingan dalam negeri ditetapkan oleh pemerintah, bukan mengikuti mekanisme pasar,” tegasnya.

Dibandingkan harus mendirikan BLU Pungutan Batu Bara, wakil wakil Sumatera Selatan II itu meminta pemerintah menguatkan pengawasan pelaksanaan kebijakan DMO. Pengawasan, jelasnya, harus diiringi dengan ketegasan pemerintah dalam menegakan hukuman kepada para pengusaha yang terbukti melanggar DMO.

Berdasarkan informasi yang ia terima, walaupun terdapat beberapa perusahaan telah memenuhi kewajiban DMO, akan tetapi masih ada perusahaan yang sama sekali tidak memenuhi kewajiban DMO sesuai ketetapan pemerintah. Dirinya berharap kebijakan DMO tetap dijalankan demi menjaga keandalan alokasi sekaligus harga batu bara dalam negeri sehingga ketahanan energi tetap terlindungi.

Demikian, ia pun menekankan komitmen pemerintah untuk menerapkan implementasi dan evaluasi kebijakan DMO secara berkala menjadi solusi utama mencegah krisis pasokan batu bara dalam negeri terulang kembali.

“Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan PT PLN berkomitmen peningkatan pengawasan pasokan DMO batu bara serta penegakan sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi komitmennya. Semoga komitmen pemerintah itu tidak hanya bagus di atas

kertas, namun juga bagus di tataran implementasi,” tandas Yulian. ● ts/es

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar. Foto: Gerald/nvl



## Batu Bara di Tengah Transisi Energi Baru Terbarukan



Indonesia masih menjadikan batu bara sebagai tulang punggung energi listrik nasional. Padahal Indonesia memiliki target mencapai **net zero emission** pada tahun 2060 dengan meninggalkan energi fosil.

Berdasarkan data bauran energi primer nasional Kementerian ESDM, sejak 2015 hingga 2020, porsi bauran energi batu bara masih mendominasi dengan capaian **38,04 persen** pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa **batu bara** masih menjadi sumber energi yang mendominasi di Indonesia.

### Capaian Bauran Energi Primer 2015-2020



Bauran Energi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EBT	4,40 %	6,61%	6,24%	8,55%	9,15%	11,2%
Minyak Bumi	46,48%	40,36%	42,09%	38,81%	33,58%	31,6%
Batubara	27,98%	30,68%	30,33%	32,97%	37,15%	38,04%
Gas Bumi	21,14%	22,35%	21,34%	19,67%	20,13%	19,16%

Sumber : Buku Bauran Energi Nasional, Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM

Sebagai energi yang berasal dari fosil, industri batu bara, selain menghasilkan emisi dari operasi pembangkit juga **menimbulkan berbagai dampak seperti:**

1. Pencemaran air akibat kontaminasi limbah sisa kegiatan pertambangan
2. Kerusakan jalan akibat kegiatan pertambangan
3. Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan
4. Berkontribusi signifikan pada meningkatnya emisi CO<sub>2</sub> melalui seluruh kegiatan supply chain industri batu bara global.







**Sementara itu**, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, **sektor energi berkontribusi paling banyak terhadap emisi Gas Rumah Kaca** dibandingkan sektor lainnya, meskipun pada tahun-tahun tertentu, sektor **kehutanan dan penggunaan lahan** juga berkontribusi besar dalam **emisi Gas Rumah Kaca**.

## Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Tahun 2014-2019

Tahun	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	Peat Fire	Limbah	Total
2014	531.142	47.489	112.801	215.318	499.389	102.834	1.508.973
2015	536.306	49.297	117.160	742.843	822.736	106.061	2.374.403
2016	538.025	55.307	122.801	417.385	90.267	112.352	1.335.521
2017	562.244	55.395	127.503	476.005	12.512	120.191	1.353.850
2018	595.665	59.262	110.055	602.188	121.322	127.077	1.615.569
2019	638.808	60.175	108.598	468.427	456.427	134.119	1.866.552

Sumber : Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Dorong Percepatan Transisi Menuju EBT



Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto menegaskan Komisi VII berkomitmen untuk terus mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke Energi Baru Terbarukan. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*.

"Batu bara sangat rentan karena menjadi komoditas yang semakin terbatas, apalagi sudah semakin dibatasi karena polutif. Kita juga sudah meratifikasi perjanjian Paris. Hal ini menjadi dasar bahwa EBT sebuah keharusan dilakukan mitigasi." ujarnya.

Menurut Sugeng, krisis pasokan batu bara yang terjadi pada akhir tahun 2021 lalu, merupakan pertanda bagi pemerintah untuk mendorong penerapan EBT di Indonesia. Krisis ini juga menjadi

bukti adanya kesalahan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.

Untuk itu, Sugeng menegaskan bahwa transisi energi bukan sebuah pilihan, namun sebuah keharusan. Pasalnya, transisi energi merupakan upaya menuju net zero emission. "Sumber daya fosil kekayaan kita juga, bukan berarti menghapus (penggunaan) fosil, tapi emisinya, karbonnya yang ditekan," tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno menilai, Indonesia perlu melakukan percepatan transisi energi ke EBT dengan memfasilitasi progres pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT baik dalam bentuk geothermal, surya, solar hidro dan bentuk lainnya.

"Ke depannya, kita memang perlu mempercepat dan memfasilitasi progres dari pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT. Ini komitmen kita untuk mempercepat transisi energi dari energi fosil ke EBT," katanya. • [bia/es](#)

# Kata DPR tentang Rencana Substitusi LPG menjadi DME

Selama ini hampir seratus persen *liquid petroleum gas* (LPG) yang ada di dalam negeri merupakan produk impor. Meski demikian, tentu harus ada persiapan yang matang untuk bisa merealisasikan rencana substitusi atau LPG dengan dimethyl ether (DME). Berikut beberapa pendapat anggota DPR RI dari Komisi VII yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Komisi VI DPR RI yang diantaranya membidangi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perdagangan. • ayu/es

## Wakil Ketua Komisi VI DPR RI - Mohamad Hekal :

Saya setuju soal DME, dan kami tentu mendukung rencana pemerintah yang akan mengganti LPG impor dengan DME yang berasal dari batu bara. Namun tentu harus dipikirkan lagi berbagai halnya, terlebih salah satu BUMN kita, PT Bukit Asam akan menjadi penyuplai batu bara untuk DME itu baru saja memiliki pemimpin baru (Dirut-red). Sehingga tentu harus dipersiapkan dulu segala sesuatunya dengan lebih matang lagi.

Jangan sampai rencana baik itu nantinya malah akan menjadi bumerang yang merugikan PT Bukit Asama atau BUMN kita sendiri. Pasalnya sebagaimana diketahui untuk mengganti LPG impor ke DME batu bara itu, selain membutuhkan teknologi dan investasi atau biaya yang cukup tinggi.

## Anggota Komisi VI DPR RI - Khilmi :

Saya sangat mendukung rencana substitusi LPG ke DME. DME atau dimethyl ether itu sendiri merupakan pengembangan teknologi dari batubara kalori rendah. Karena sebagaimana diketahui ketergantungan Indonesia terhadap gas LPG sangat tinggi. Sehingga jika DME bisa diproduksi sendiri oleh Negara kita, melalui PT Bukit Asam dan Pertamina tentunya, maka akan membantu devisa negara yang sangat besar. Sementara itu, untuk para pelaku industri LPG hingga sampai ke agen eceran jangan khawatir, karena core bisnis DME ini tidak berbeda LPG.

## Wakil Ketua Komisi VII DPR RI - Dony Maryadi Oekon :

Terus terang, saya betul-betul ingin mendorong DME agar dapat mensubsitisi LPG. Penggunaan LPG di Indonesia cukup tinggi, kurang lebih 96 persen masyarakat Indonesia, khususnya rumah rumah tangga menggunakan LPG. Namun kita ketahui harga LPG saat ini bisa dikatakan sebagai bahan bakar yang paling mahal. Pasalnya, hampir seratus persen LPG merupakan produk impor, yang tentu mendapat subsidi Negara. Sehingga dengan mengembangkan dan memproduksi DME ini bisa membantu Negara mengurangi subsidi terhadap LPG impor tadi.

Tidak hanya itu, konon, DME juga lebih ramah lingkungan. DME dinilai lebih mudah terurai di udara, sehingga tidak merusak ozon dan meminimalisir gas rumah kaca hingga 2 persen. Sementara menurut Data Kementerian ESDM, LPG per tahun menghasilkan emisi 930 kg CO<sub>2</sub>. Dengan DME akan berkurang menjadi 749 kg CO<sub>2</sub>.

## Anggota Komisi VII DPR RI - Mulyanto :

Substitusi LPG dengan DME, sebagai hasil gasifikasi batu bara adalah langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor LPG. Hal ini tentu harus kita dukung. Meski demikian, Pemerintah juga harus menghitung secara cermat aspek keekonomiannya. Jangan sampai upaya ini malah membebani APBN kita.

Saya berharap pemerintah menyiapkan skema produksi, distribusi dan mekanisme substitusi LPG ke DME secara cermat. Agar harga DME bisa bersaing dengan harga LPG, termasuk juga dengan harga gas alam (LNG) atau kompor listrik. Karena kalau biaya produksi DME lebih mahal, tentu itu akan berpotensi membebani APBN.



## Mengenal Lebih Jauh DME, Pengganti LPG.



Rencana pemerintah mengganti porsi LPG impor dengan DME yang dihasilkan dari batubara berkalori rendah sebagai salah satu upaya pemerintah mendukung ketahanan energi Nasional. Terutama ditujukan untuk penggunaan bahan bakar rumah tangga.

### Apa itu DME (Dimethyl Ether)

Senyawa ether paling sederhana dengan rumus kimia  $\text{CH}_3\text{OCH}_3$  yang berasal dari:



Batubara kalori rendah yang kemudian menghasilkan Coalbed Methane (CBM)



Limbah yang menghasilkan biomassa.

### Keunggulan DME :

1. Dapat di produksi dari berbagai sumber energi.
2. Mudah terurai di udara sehingga tidak merusak lapisan ozone.
3. Nyala api yang dihasilkan lebih biru dan stabil.
4. Tidak menghasilkan polutan particulate matter (PM dan Nitrogen Oksida) (NOx)
5. Tidak mengandung sulfur.
6. Pembakaran lebih cepat dibanding LPG.

### Manfaat Substitusi DME:

1. Menekan impor LPG hingga 1 Jt Ton/Tahun dengan produksi DME 1,4 Jt Ton/Tahun.
2. Meningkatkan ketahanan energi Nasional.
3. Menghemat cadangan devisa hingga Rp 9,7 Triliun/Tahun.
4. Menambah investasi asing hingga sekitar 2,1 Miliar Dollar Amerika Serikat.
5. Multi Player Effect hingga Rp 800 Milliar/Tahun.
6. Memberdayakan industri Nasional yang melibatkan tenaga lokal.



#### Kandungan Panasnya :

12.076 Kcal/Kg.

7.749 Kcal/Kg.

#### Emisi :

930 Kg CO<sub>2</sub>/Tahun.

745 Kg CO<sub>2</sub>/Tahun.

#### Nilai Kalor :

50,56 MJ/Kg.

30,5 MJ/Kg.

#### Efisiensi :

53,75 - 59,13%.

64,7 - 68,9%.

# Menakar Tata Kelola Batu Bara



Oleh; Fahmy Radhi

Pengamat Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Sejak 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memutuskan kebijakan DMO batu bara. Melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 menetapkan target pasokan batu bara ke PLN sebesar 25 persen dari total produksi batu bara per tahun. Kepmen itu juga menetapkan harga jual batu bara ke PLN dengan harga batas atas (*ceiling price*) US \$70 per metric ton dan harga batas bawah (*flooring price*) US \$45 per metric ton. Pada saat harga pasar meroket mencapai di atas *ceiling price*, PLN membeli batubara dengan harga sebesar US \$70 per metric ton. Sebaliknya pada saat harga pasar terpuruk di bawah *flooring price*, PLN membeli batu bara dengan harga US \$45 per metrik ton.

Penetapan DMO memang merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap liberalisasi pasar melalui pengendalian pasokan produksi dan penetapan harga. Secara teoritis, intervensi pemerintah

Bagi Indonesia, sebagai negara penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia, sungguh amat ironis bisa terjadi krisis pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bak pepatah mengatakan "Ayam Mati di Lumbung Padi". Krisis pasokan batu bara itu terjadi lantaran sebagian besar pengusaha batu bara tidak memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) pada saat harga batu bara dunia melambung tinggi. Dalam skema DMO, harga batu bara yang dijual kepada PLN ditetapkan oleh Pemerintah, sedangkan yang diekspor, ditetapkan sesuai mekanisme pasar.

itu diperbolehkan untuk mencapai tujuan negara yang menyangkut kepentingan rakyat. Tujuan penetapan DMO harga batu bara adalah memenuhi kepentingan PLN, maupun kepentingan penguasaha batubara, tanpa menurunkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pembayaran *royalty*. Untuk itu, prinsip dalam penetapan DMO harga batu bara adalah berbagi keuntungan dan kerugian (*share gain, share pain*), dengan skema batas atas dan batas bawah (*ceiling and floor price*). Penerapan *share gain, share pain* sesungguhnya sesuai dengan prinsip 'gotong-royong', wujud dari 'berat sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijijjing'





## KRISIS PASOKAN BATU BARA

Sepanjang 2021 harga batu bara dunia cenderung meningkat, puncaknya terjadi pada awal Oktober 2021, harga batu bara sempat meroket hingga mencapai sebesar US\$ 269,5 per metric ton. Ada kenaikan sekitar 235 persen dibanding harga pada Oktober 2020 yang mencapai sebesar US\$ 80,5/ton. Di akhir tahun, harga batu bara dunia sempat turun hingga mencapai US\$ 203 per metric ton. Kenaikan harga batu bara itu, salah satunya dipicu oleh tingginya permintaan impor batubara dari negeri China, India dan beberapa negara Uni Eropa yang kembali menggunakan batubara saat terjadi krisis energi di negerinya

Di satu sisi, meroketnya harga batu bara menaikkan ekspor, yang sangat menguntungkan bagi negara dan pengusaha batu bara. Namun, di sisi lain merugikan bagi industri dalam negeri, yang menggunakan batu bara sebagai energi utama. PLN termasuk pengguna batu bara dalam jumlah besar untuk energi primer pembangkit listrik, sekitar 63 persen pembangkit listrik menggunakan batu bara dalam bauran energi untuk memproduksi setrum. Hanya, PLN tidak begitu merasakan dampak meroketnya harga batu bara lantaran adanya kebijakan DMO.

Hanya membumbungnya harga batubara dunia menyebabkan disparitas harga dunia dengan harga DMO semakin menganga. Dalam kondisi tersebut, naluri pengusaha untuk meraub keuntungan besar dengan lebih mendahulukan mengekspor batubara dengan harga di atas US\$ 200 per metric ton ketimbang menjual ke PLN dengan harga US\$ 70 per metric ton. Akibatnya, PLN kekeurangan pasokan yang menyebabkan terjadinya krisis batubara. Hingga Desember 2021, dari 5,1 juta ton kebutuhan PLN, pengusaha hanya memasok sebesar 350 ribu metrik ton atau sekitar 0,06 persen dari total kebutuhan. Memang ada denda

bagi pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan DMO batu bara, namun dendanya sangat kecil.

Kalau kebutuhan PLN tidak segera dipenuhi berpotensi menyebabkan 20 PLTU batu bara dengan daya sekitar 10.850 mega watt atau sekitar 10 juta pelanggan akan terjadi pemadaman. Untuk mengatasi krisis batu bara itu, tanpa diduga pemerintah melalui Kementerian ESDM menempuh kebijakan radikal dengan melarang ekspor batubara selama sebulan pada 1-31 Januari 2021. Selain penguasaha batu bara di dalam negeri, sejumlah negara telah melancarkan protes keras kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakan larangan ekspor batubara. Berbagai negara mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu bara, yang sempat menimbulkan gonjang-ganjing

## DMO VERSUS BLU

Untuk mengakhiri gonjang-ganjing itu, tidak sampai sebulan, tetapi hanya 2x24 jam larangan ekspor batu bara dicabut oleh pemerintah. Pasca gonjang-ganjing pelarangan ekspor batu bara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berinisiasi akan mengevaluasi kebijakan harga jual batu bara untuk PLN. Rencananya Domestic Market Obligation (DMO) akan dihapus, yang akan diganti dengan skema Badan Layanan Umum (BLU). Dalam skema BLU, PLN akan membeli batu bara dengan harga pasar, bukan dengan harga DMO. Selisih harga pasar dengan DMO akan ditanggung BLU, yang dananya berasal dari iuran pengusaha yang melakukan ekspor batu bara.

Skema BLU sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru akan menimbulkan masalah baru. Tidak ada jaminan bahwa PLN akan mendapatkan pasokan sesuai jumlah kebutuhannya meskipun PLN membeli sesuai harga pasar. Berdasarkan kontrak jangka panjang, pengusaha akan mendahulukan pasokan batu

bara kepada pembeli di luar negeri ketimbang menjual ke PLN, yang mendasarkan pada kontrak jangka pendek. Kalau benar, tidak dapat dihindari PLN akan kembali mengalami krisis batu bara, yang mengancam pemadaman sebagian besar pembangkit listrik yang menggunakan batu bara.

Berdasarkan kebutuhan batu bara PLN sebesar 5,1 juta ton, penggantian selisih antara harga pasar dibayarkan PLN dengan harga DMO US\$ 70 per metric ton, jumlahnya sangat besar. Kalau harga pasar batu bara saat ini mencapai US\$ 203 per metric ton, maka total penggantian dari iuran tersebut mencapai sebesar US\$ 816 juta ( $(203-70) \times 5,1$  juta ton = US\$ 816 juta). Dengan dana sebesar itu tentunya ada keengganan pengusaha untuk membayar iuran BLU. Kalau iuran itu gagal dibayarkan kepada PLN karena keengganan pengusaha, harga pokok penyediaan (HPP) sudah pasti akan membengkak. Dalam kondisi tersebut, kalau tidak ingin bangkrut, PLN harus menaikkan tarif listrik yang makin memberatkan rakyat. Kalau pengusaha batubara patuh membayar iuran terkesan PLN minta-minta belas kasihan dari pengusaha.

Ketimbang menggunakan skema BLU, yang akan menimbulkan masalah baru, akan lebih baik tetap menggunakan skema DMO batubara dengan melakukan perbaikan aturan DMO. Pertama, menetapkan jadwal pasokan ke PLN per bulan, bukan pertahun, yang akan digunakan sebagai dasar penetapan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan per bulan. Kedua, menetapkan sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi pasokan dengan melarang ekspor pada bulan berikutnya. Perbaikan aturan DMO akan mencegah kembalinya terjadi krisis batubara yang dialami PLN, maka janganlah dihapus DMO batu bara. Bahkan DPR juga menyatakan ketidaksetujuan dengan skema BLU dan mendesak untuk tetap memberlakukan DMO. ●



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Ojji/mvt

# Penggabungan Lembaga Riset ke BRIN Jangan Ciptakan Masalah Baru

Peleburan lembaga riset ke dalam induk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai sebagian pihak yang kontra telah menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian Indonesia.

penetapan kebijakan pembangunan nasional. Ia menyebutkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN maka riset dari berbagai lembaga kementerian diintegrasikan menjadi satu di bawah koordinasi BRIN.

“Beberapa lembaga yang terintegrasi ke dalam BRIN di antaranya adalah PT IPTEK dan Lembaga LBM Eijkman. Untuk itu Komisi VII DPR mendesak pemerintah agar upaya tata kelola dan mekanisme penggabungan lembaga-lembaga riset tersebut ke dalam BRIN jangan malah menciptakan permasalahan baru,” kata Eddy.

Terlebih lagi, tambah Eddy, saat ini LBM Eijkman tengah melaksanakan pengembangan Vaksin Merah Putih. “Jangan sampai proses peleburan LBM Eijkman akan mengganggu jalannya proses pengembangan Vaksin Merah Putih. BRIN harus dapat mengapresiasi keberadaan peneliti yang ada di LBM Eijkman,” tegasnya.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penguatan riset

Selain itu, proses peleburan lembaga riset membuat ratusan peneliti terancam kehilangan pekerjaan mereka. Pada awal Januari 2022 lalu tersiar kabar, ratusan saintis Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman diberhentikan tanpa pesangon. Kabar yang sama juga terjadi kepada para

periset di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dibentuk untuk menjadi lembaga yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan riset dan inovasi di Indonesia sebagai landasan ilmiah terkait rumusan dan



harus dilakukan sejalan dengan penambahan peneliti-peneliti baru. Indonesia membutuhkan banyak sekali peneliti untuk membangun dan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di tanah air.

“Apalagi dalam menghadapi kasus Covid-19 yang tidak kunjung berakhir Indonesia membutuhkan periset - periset yang paham dalam bidang biologi molekuler, sehingga tidak ada lagi anggaran negara habis karena kebijakan yang didasarkan kepada dan rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkapnya.

Eddy mengatakan, Komisi VII juga mendesak Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko agar selama proses pengintegrasian lembaga dan kementerian ke dalam BRIN tetap memberdayakan para peneliti dan ilmuwan yang selama ini menjadi periset, peneliti dan perekayasa. Serta, melanjutkan riset dan hal-hal strategis lainnya yang sudah dilakukan.

“Komisi VII DPR RI juga mendesak Kepala BRIN RI untuk tidak menggunakan anggaran pada pos yang belum disetujui dalam pembahasan anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022,” tandasnya.

Dikatakannya, Komisi VII akan mendalami pengintegrasian lembaga dan kementerian riset ke dalam BRIN dengan membentuk Panja Kelembagaan dan Hilirisasi IPTEK. “Kami meminta Kepala BRIN menyampaikan data terkait lembaga dan kementerian yang telah dan belum mengalihkan penelitiannya ke BRIN beserta aset dan kelengkapan lainnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, jagat peneliti di berbagai kementerian dan lembaga negara (K/L) saat ini sedang resah. Hal itu disebabkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Nomor B/295/M.SM.02.03/2021, tertanggal 22 Juli 2021, tentang Pengalihan Peneliti pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian/Lembaga



## “KAMI MEMINTA KEPALA BRIN MENYAMPAIKAN DATA TERKAIT LEMBAGA DAN KEMENTERIAN YANG TELAH DAN BELUM MENGALIHKAN PENELITIANNYA KE BRIN BESERTA ASET DAN KELENGKAPAN LAINNYA”

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Oji/nvi

(K/L) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Edaran tersebut meminta BRIN melakukan pemetaan kebutuhan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh peneliti dari K/L. Pada saat bersamaan K/L memilah mana peneliti yang dialihkan ke BRIN dan yang tetap di K/L karena berbagai alasan. Peneliti yang tidak pindah ke BRIN tidak lagi diakui sebagai fungsional peneliti. Semua proses ini ditargetkan selesai akhir Desember 2022.

Surat edaran MenPANRB itu sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN. Perpres ini merupakan terjemahan dari Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK),

terutama pada ayat 1 yang berbunyi, “Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional”. Perdebatan yang berkembang, terkait dengan terjemahan dari ayat satu di atas, terutama untuk kata terintegrasi.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2021, menerjemahkannya dengan menyatukan semua fungsional peneliti di bawah pengelolaan BRIN. Pada tahap awal dilakukan pada empat lembaga penelitian non kementerian, yaitu LIPI, BPPT, LAPAN dan BATAN. Menurut data Badan Kepegawaian Negara proses ini akan melibatkan sekitar 10.610 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Belum ada angka pasti ASN yang ada di 48 lembaga penelitian K/L. ● dep/es

# PEN 2022, Maksimalkan untuk Perlindungan Sosial

Penanggulangan pandemi Covid-19 tak terlepas dari upaya pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, selama 'pagebluk' corona tersebut berlangsung, DPR RI bersama pemerintah menganggarkan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), yang salah satunya menasar perlindungan sosial bagi masyarakat.

efektif dan responsif. Tak hanya itu program PC-PEN tahun kemarin terbukti mampu mengantisipasi dampak sosial dan kesehatan, sehingga dapat tetap mengakselerasi pemulihan ekonomi.

"Momentum berlanjutnya pemulihan dan di tahun 2021 menjadi modal yang kuat untuk melanjutkan berbagai kebijakan tahun 2022 ini," ungkap Dito. Sebagaimana diketahui, program PC-PEN tahun 2022 ini pemerintah mengalokasikan sebesar Rp455,62 triliun dengan alokasi kesehatan Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun, dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun.

**P**andemi Covid-19 tak hanya menyisakan dampak kesehatan bagi rakyat Indonesia dan warga dunia. Namun juga memberikan dampak terhadap permasalahan sosial dan kelesuan

ekonomi nasional. Tapi berkat Program PC-PEN yang fokus kepada dampak-dampak tersebut, permasalahan dapat diatasi.

Berkaca pada PC-PEN tahun lalu, Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menilai program tersebut terbukti

## ESTIMASI ANGGARAN PEN 2022

### Penanganan Kesehatan



**Rp 122,5 triliun**

### Perlindungan Sosial



**Rp 154,8 triliun**

### Pemulihan Ekonomi



**Rp 178,3 triliun**

**Total : Rp 455,62 triliun**

Sumber : paparan Kementerian Keuangan

Infografis : Andi Nurul N.R.





Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto. Foto: Metrari/Man

Adapun menurut Dito, sektor PC-PEN pada program perlindungan sosial bersama pemulihan ekonomi dianggap mampu menekan tingkat kemiskinan salah satunya melalui program Kartu Pra Kerja. Itulah kenapa Legislator Dapil Jawa Tengah VIII itu mendorong agar perlindungan sosial pada PC-PEN juga harus fokus untuk mengakselerasi pemulihan melalui berbagai program penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan.

**PEMULIHAN MASYARAKAT**

Sektor perlindungan sosial tetap menjadi perhatian utama masyarakat luas. Untuk itulah, Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah berharap aspek tersebut tetap mendapat perhatian dari pemerintah. Tak hanya itu, pemulihan ekonomi masyarakat juga harus memperhatikan faktor sosial masyarakat yang ada.

“Saya tetap berharap perlindungan sosial tetap diutamakan. Karena pada pemulihan ekonomi ini belum sepenuhnya masyarakat pulih,” ujar Ahmad. Untuk itu ia mendorong agar anggaran pada sektor perlindungan sosial dapat terus berjalan dan implementasinya dapat dirasakan

oleh masyarakat luas. Yang mana perlindungan sosial pada akhirnya akan berdampak pada pemulihan terhadap pandemi menjadi lebih cepat.

“Jadi intervensi kebijakan terhadap kegiatan ekonomi ini harus ditunjang dengan dorongan stimulasi terhadap masyarakat sehingga pemulihan bisa berjalan cepat dan optimal,” sebut Politisi Fraksi PAN tersebut. Itulah mengapa, kata Ahmad, bagian perlindungan sosial sangat penting. Sama pentingnya dengan subsidi pemerintah pada sektor kesehatan.

Untuk itu ia berpesan agar penyerapan anggaran pada sektor tersebut dapat tepat sasaran. “Harus terus dioptimalkan sarannya sehingga bisa maksimal dirasakan bagi masyarakat banyak,” terang Ahmad.

Pemerintah diketahui tetap melanjutkan program perlindungan sosial. Program yang diutamakan merupakan lanjutan dari PEN tahun-tahun sebelumnya, seperti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Alokasi anggaran itu untuk program bantuan sosial (bansos) sebagai penyangga apabila terjadi kembali pembatasan kegiatan masyarakat.

Presiden Jokowi telah menyetujui untuk dilakukan front-loading beberapa program bansos di kuartal I-2022, seperti perluasan penerima manfaat untuk program bansos tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLWN) yaitu penambahan sebanyak 1,76 juta nelayan penduduk miskin ekstrem di wilayah pesisir.

Dengan demikian total target sasaran menjadi 2,76 juta orang setelah ditambah dengan 1 juta orang pemilik warung. Bansos tersebut disalurkan di 212 kabupaten/kota yang masuk pada target pengentasan kemiskinan ekstrem di 2022. ● ah/es



**“SAYA TETAP BERHARAP PERLINDUNGAN SOSIAL TETAP DIUTAMAKAN. KARENA PADA PEMULIHAN EKONOMI INI BELUM SEPENUHNYA MASYARAKAT PULIH,”**

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah. Foto: Ariel/nvl

# RUU SKN: Akomodir Kesejahteraan Mantan Atlet

Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) merupakan RUU yang dibentuk guna memastikan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan keolahragaan, guna menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

**A**pril 2021 lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional agar bisa menjamin kesejahteraan atlet terutama ketika sudah pensiun. Ia mengusulkan untuk membentuk dana asuransi khusus olahragawan sebagai jaminan masa depan atlet. Dia berharap dengan adanya revisi UU SKN yang akan dirumuskan dapat menjadi solusi permasalahan olahraga nasional, termasuk soal dana asuransi atlet.

Jaminan kesejahteraan yang belum terpenuhi menjadi keluhan di kalangan para atlet nasional. Mantan pebulu tangkis Susi Susanti, yang sempat mengutarakan pendapatnya soal UU SKN yang belum menjamin

kejelasan masa depan atlet ketika sudah pensiun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) yang telah ditetapkan sejak 15 tahun lalu belum mengakomodir status profesi atlet. Hal itu berpengaruh pada tidak adanya profesi atlet di dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun

2003. Dengan demikian, jaminan kesejahteraan bagi pelaku olahraga bisa dibilang masih belum jelas, khususnya soal gaji/honor, penghargaan, pemotongan pajak, jaminan kesehatan, pensiun/jaminan hari tua.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: Mentari/rvi





Berkenaan dengan itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada September 2021 lalu mengakui bahwa sejauh ini belum ada regulasi khusus yang mengatur kesejahteraan para atlet nasional. Komisi X DPR RI saat itu sedang mengarsiteki Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) yang mencakup kesejahteraan atlet, baik selama aktif maupun pensiun dari dunia olahraga prestasi.

“Kita belum punya regulasi yang secara definitif dan pasti mengatur sebuah tema besar kesejahteraan atlet. Suara ini semakin relevan supaya semakin banyak anak muda Indonesia menggeluti bidang olahraga,” kata Huda saat menjadi narasumber dalam Forum Legislasi bertajuk ‘Masa Depan Atlet Nasional Dalam RUU SKN’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta baru-baru ini.

Syaiful Huda pun menegaskan, RUU SKN penting untuk memastikan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Beberapa catatan penting dalam isu kesejahteraan tersebut menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni dalam UU SKN, atlet sudah disebut sebagai profesi pekerjaan. Namun, dalam UU Ketenagakerjaan tidak disebut sebagai profesi pekerjaan. Akibatnya, atlet tidak mendapat jaminan sosial dari BPJS. Di sinilah butuh sinkronisasi legislasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan, Saat ini tim Panitia Kerja (Panja) RUU SKN telah melakukan Uji Publik pada tanggal 6-8 Desember 2021 dan 10-12 Desember 2021. Adapun uji publik tersebut dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu di Semarang, Makassar, dan Medan, serta Pekanbaru, Denpasar, dan Mataram.

“(Hal itu dilakukan) untuk memperkaya masukan dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan



## ATAU ISTILAH UU SKN SEKARANG, (JAMINAN SOSIAL DIBERIKAN) BAGI PROFESI KEOLAHRAGAAN ATAU OLAHRAGAWAN, BAIK TATKALA MASIH AKTIF MAUPUN KETIKA SUDAH PURNA

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.  
Foto: Ariel/nvl

olahraga,” ujarnya ketika dihubungi tim **Parlementaria**, awal Februari.

Dia mengungkapkan, Panja RUU SKN yang dipimpin oleh Dede Yusuf, hingga kini masih melaksanakan konsinyering. Pasalnya, RUU SKN ini ditargetkan selesai dalam masa sidang kini yang akan berakhir pada 19 Februari mendatang.

“Tapi tentu sangat tergantung beberapa pihak yang terkait. Karena hingga tadi, kelembagaan masih jadi isu krusial. (sehingga) butuh persetujuan fraksi-fraksi,” lanjut politisi dapil Jawa Tengah IX.

“Karena semula pemerintah berpandangan bahwa kelembagaan

Olahraga cukup satu saja. Namun dalam perkembangannya, pemerintah berubah sikap, dan mengusulkan tetap sebagaimana sebelumnya, yakni 2 (lembaga), Nasional dan yang keluar (internasional),” terangnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan, beberapa isu minor yang telah diselesaikan oleh Komisi X DPR RI hingga kini diantaranya yakni: Tujuan Keolahragaan Nasional; Pelatih Olahraga; Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah; Sarana dan Prasarana (Infrastruktur); Olahraga Penyandang Disabilitas; Naturalisasi Atlet; serta Desain Besar Olahraga Nasional.

Sedangkan untuk isu mayor, Komisi X telah menyelesaikan isu-isu seperti: Ruang Lingkup Olahraga; Olahraga Berbasis Teknologi; Big Data Olahraga; Industri Olahraga; Olahragawan sebagai Profesi; Jaminan Sosial; Penghargaan Olahraga; Sumbangan Badan Usaha/CSR; Dana langsung ke Cabor; Kelembagaan Sengketa (BAKI dan BAORI); Anti-doping dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI); Pendanaan Olahraga; Kelembagaan KONI dan KOI; dan Suporter.

Terkait kesejahteraan atlet, dirinya memastikan bahwa semangat pada tim panja sejalan dengan pemerintah. Yakni, guna memperjuangkan nasib para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia.

“Kalau tentang kesejahteraan atlet baik yang masih atlet maupun yang sudah berhenti berlaga, semangatnya sama antara pemerintah dan DPR. Hanya tentu disesuaikan dengan perundangan yang lain,” tegas Fikri Faqih.

Dirinya berharap, revisi yang dituangkan dalam RUU SKN dapat menjadi titik awal akan jaminan sosial yang lebih baik bagi para atlet.

“Atau istilah UU SKN sekarang, (jaminan sosial diberikan) bagi profesi keolahragaan atau olahragawan, baik tatkala masih aktif maupun ketika sudah purna,” tutupnya. ● hal/es



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat Kunjungan Kerja meninjau pelaksanaan vaksinasi di SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu, (19/01). Foto: Gerald/Man



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meninjau revitalisasi Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah. Foto: Gerald/Man





Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat berkunjung ke PT Gani Arta Dwitunggal, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/1).  
Foto: Azka/Man



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menerima kehadiran Komunitas Vespa yang hadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). Foto: Runi/Man



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat audiensi di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2022). Foto: Andri/Man



Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Maman Imanul Haq saat menerima Komunitas Penutur Sunda (KPS) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022). Foto: Runi/Man



# Minyak Goreng yang Digoreng

**A**khir tahun 2021 lalu, masyarakat mendapat kado pahit terkait kenaikan harga minyak goreng. Menurut Pemerintah, hal tersebut terjadi karena peningkatan harga CPO (crude palm oil) di pasar internasional. Berdasarkan hasil pantauan redaksi Parlementaria di Pasar Tradisional Sipon Tangerang, harga minyak goreng curah kini berkisar Rp 37.000-38.000 per dua liter. Artinya masih sekitar Rp 19 ribuan per liter.

Namun beberapa pedagang kecil di pasar, ada juga yang menjual dikisaran Rp.20 ribu per liter. Pada kondisi seperti ini, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang tergerak hatinya, dengan membuat event bazar minyak goreng murah, seperti yang dilakukan di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Akhirnya, pada 19 Januari 2022 Pemerintah resmi mengimplementasikan kebijakan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter di toko-toko ritel modern, dengan pembatasan pembelian.

Akibat kebijakan ini, terlihat di sejumlah jaringan Indomart minyak goreng subsidi pemerintah ini dengan cepatnya habis. Kondisi ini berbeda dengan supermarket, terlihat ketersediaan stock minyak bantuan pemerintah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, untuk pembelian minyak goreng ini dibatasi perkonsumen maksimal 2 liter/hari atau 1 pcs untuk kemasan 5 liter per konsumen/hari. ●  
foto/teks : jaka











Lodewijk Fredrich Paulus

# PENGABDIAN SEORANG PRAJURIT

Langowan, 1957, sebuah kecamatan di Minahasa, Sulawesi Utara. Wilayah yang dingin dan berbatasan langsung dengan Danau Tondano. Penduduknya mayoritas petani. Komoditas yang banyak ditanam di sana adalah cengkeh. Langowan tidak jauh dari Manado, ibu kota Sulawesi Utara. Jaraknya sekitar 55 km.

**S**yahdan, hari itu bayi mungil menggemaskan lahir. Tangis bayi memecah kesunyian. Kalender di dinding menunjukkan 27 Juli 1957.

Bayi berjenis kelamin laki-laki itu oleh orangtuanya kemudian diberi nama Lodewijk Fredrich Paulus. Lodewijk kecil tumbuh di tengah keluarga sederhana dan penuh disiplin. Ayah Lodewijk adalah seorang tentara.

Masa kecil Lodewijk dihabiskan di Langowan. Ia suka sekali bermain dengan sahabat-sahabat kecilnya di kampung. Permainan favorit Lodewijk adalah perang-perangan. Ia suka membuat senjata mainan dari bambu yang pelurunya dibuat dari gulungan kertas basah. Peluru kertas itu bila kena tubuh, apalagi mata lumayan menyakitkan.

Mengawali pendidikan formalnya, Lodewijk kecil

bersekolah di sekolah dasar Langowan. Hanya tiga tahun di sekolah ini, Lodewijk hijrah ke Jakarta mengikuti tugas ayahnya. Dia kemudian melanjutkan sekolah dasarnya di SD Muhammadiyah, Tanjung Priok, Jakarta. Setamat SD, tahun 1970, ia kembali ke Manado dan bersekolah di SMP Negeri 2 Manado.

Bila ditanya, apa cita-citanya sedari kecil? Lodewijk menjawab, ingin jadi tentara. Tekad Lodewijk kecil sangat kuat untuk menjadi tentara. Ia ingin mengikuti jejak sang ayah yang mengabdikan di dunia militer. Sejak SMP ia sudah menyiapkan diri menjadi seorang tentara profesional.

### MENJADI TENTARA

Tamat SMP tahun 1973, Lodewijk muda melanjutkan sekolah ke SMA 1 Manado. Hanya sampai satu tahun di sekolah ini, ia mengikuti pamannya hijrah ke Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah dengan menaiki kapal kecil. Ia melanjutkan kelas 2 SMA di Luwuk Banggai. Lagi-lagi, di sekolah ini pun ia tak lama. Jelang ujian kelas 2, ia pindah lagi ke SMA Negeri 1 Palu.

Setamat SMA tahun 1976, Lodewijk muda konsisten mengejar cita-citanya menjadi seorang prajurit tentara, seperti diidamkan sejak kecil. Saat itu ia harus mengikuti sejumlah tes untuk masuk AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). “Sejak dulu saya bercita-cita ingin jadi tentara. Jadi apaun rintangannya, saya hadapi. Untuk tes renang, saya belajar renang di pantai, karena waktu itu tidak ada kolam renang,” ungkap Lodewijk.

Mengawali tesnya, ia jalani di Manado, lalu di Palu dan kembali lagi ke Manado. Setelah dinyatakan lulus tes di tingkat daerah, ia pun menghadapi tes lanjutan tingkat pusat di Magelang, Jawa Tengah. Lodewijk bercerita, ketika itu ada 27 orang yang mendaftar AKABRI dari Sulawesi Utara, baik yang ingin masuk TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL), dan Kepolisian.



“SEJAK DULU SAYA BERCIITA-CITA INGIN JADI TENTARA. JADI APAUN RINTANGANNYA, SAYA HADAPI. UNTUK TES RENANG, SAYA BELAJAR RENANG DI PANTAI, KARENA WAKTU ITU TIDAK ADA KOLAM RENANG”

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus. Foto: Faisal/Man

Yang daftar masuk AD cuma tiga orang. Dan dari 27 orang yang mendaftar dari Manado, sebelas orang akhirnya diterima masuk AKABRI termasuk Lodewijk muda. Empat tahun pemuda Lodewijk digembleng di AKABRI yang sekarang menjadi AKMIL (Akademi Militer). Cita-cita yang didambakannya sejak kecil terwujud. Ia pun mendedikasikan dirinya sebagai prajurit tentara yang berintegritas dan profesional.

Tahun 1981, lulus AKABRI dan berpangkat letnan dua (balok satu). Ia langsung ditugaskan di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). “Inilah awal pengabdian saya di Kopassus yang

pertama kali ditempatkan di Jakarta. Setelah mengikuti pelatihan komando, saya ditugaskan di Grup 3, Makassar. Saat itu, Menhankamgab (kini Panglima TNI) dijabat Pak Yusuf,” cerita Lodewijk.

Sebagai prajurit, Lodewijk pernah ditugaskan ke Timor Timur. Saat bertugas ia terkena luka tembak, hingga harus dirawat enam bulan di RSPAD. Setelah sembuh, ia kembali ke kesatuannya di Grup 3 Kopassus, Makassar. Tahun 1983, ia ikut seleksi pasukan antiteror dan lulus. Lalu, ditempatkan di Datasemen Khusus 81 Antiteror, Kopassus. “Komandannya waktu itu Pak Luhut Panjaitan dan wakilnya Pak Prabowo. Pak Luhut masih Mayor, Prabowo kapten, dan saya Letnan,” katanya.

12 tahun berkarir di pasukan antiteror, Kopassus, hingga jadi komandan satuan, Lodewijk akhirnya pindah tugas ke Medan, Sumatera Utara menjadi Asisten Operasi di Kodam I Bukit Barisan. Wilayahnya mencakup Sumatra Barat, Sumatra Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Karir militer Lodewijk terus melejit, menunjukkan kecemerlangannya. Tercatat, Lodewijk pernah menempati jabatan Komandan Korem untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Tangerang.

Tahun 2009, ia naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus. Sebelumnya, ia pernah pula menjabat Direktur Latihan, Diklat AD di Bandung, Jawa Barat. Dan yang tidak pernah ia lupakan dalam karir militernya adalah dipercaya sebagai komandan upacara HUT RI ke-62 tahun 2007 di Istana Negara. Ketika itu ia masih menjabat Danren dengan pangkat kolonel.

“Saya sempat menjadi komandan upacara di Istana Negara. Selama satu bulan saya ikut seleksi. Suara enggak boleh serak dan langkah tidak boleh salah. Tahun 2007 waktu itu, presidennya Pak SBY,” kenang Lodewijk. Memasuki tahun 2011-2013, Lodewijk kembali ke Medan, kali ini dipercaya sebagai Pangdam



Bukit Barisan dengan pangkat Mayor Jenderal.

Dua tahun di Medan, ia dapat tugas baru di Bandung sebagai Komandan Diklat AD hingga pensiun Agustus 2015 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Begitulah karir singkat di dunia militer. Pengabdianya sebagai prajurit militer sangat panjang. Semua ia dedikasikan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.

**PANGGUNG POLITIK**

Dari dunia militer, Lodewijk kemudian berkiprah di dunia politik. Berawal dari ajakan seorang teman untuk ikut Munas Partai Golkar di Bali, Lodewijk pun terjun lebih dalam ke panggung politik. Ketika itu, Golkar sedang terpecah menjadi dua kubu, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Saat Munas, ia diajak mendukung Ade Komaruddin menjadi Ketua Umum Golkar.

Namun, Munas akhirnya memilih Setya Novanto (Setnov) menjadi Ketua Umum. Dua minggu setelah Munas, ternyata Lodewijk dihubungi Setnov untuk bergabung menjadi pengurus Golkar. Ia langsung dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua Umum Bidang Kajian Strategis, Partai Golkar. Lodewijk menerimanya dan saat itulah ia resmi berpolitik praktis.

“Terus terang waktu itu saya masih buta politik. Saya juga diberi tugas oleh Pak Setnov menjadi Plt Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung. Di situlah saya belajar politik. Saya diminta menyelesaikan masalah partai di Lampung dalam waktu tiga bulan. Alhamdulillah selesai dan saya kembali ke Jakarta sebagai Waketum lagi,” ungkapnya.

Berikutnya, dalam perjalanan politik Lodewijk, ia harus menghadapi musibah yang dihadapi Setnov. Golkar pun mengadakan Munaslub dan terpilihlah Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar. Di bawah kepemimpinan Airlangga, Lodewijk kali ini dipercaya sebagai Sekjen Golkar. Pada Munas berikutnya, Airlangga tetap terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, dan



Lodewijk F. Paulus saat dilantik menjadi Pimpinan DPR RI. Foto: Jaka/Man



Bersama Pimpinan DPR RI Usai Pelantikan. Foto: Jaka/Man

Lodewijk kembali dipercaya sebagai Sekjen.

Sementara itu mengawali kiprah politiknya di parlemen, Lodewijk pun diberi kesempatan menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari dapil Lampung I. Pada Pemilu 2019, ia terpilih menjadi anggota

DPR RI dan duduk di Komisi I DPR yang membidangi politik luar negeri dan pertahanan. Memasuki tahun 2021, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengundurkan diri. Lodewijk akhirnya dipercaya menggantikan posisi Pimpinan DPR yang ditinggalkan Azis.





Lodewijk F. Paulus bersilaturahmi dengan konstituen. Foto: Doc/Man

Tepat 30 September 2021, Lodewijk dilantik menjadi Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Begitulah perjalanan karir singkat seorang Lodewijk F. Paulus dari militer sampai parlemen. Ketika ditanya, apa yang dirasa berbeda antara dunia militer dan politik? “Di militer, kalau panglimanya bilang A, sampai ke Babinsa pasti A. Cuma kalau di politik yang terjadi sebaliknya,” kilahnya, membandingkan kiprah militer dan politik.

### HOBİ BEROLAHRAGA

Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, ia masih bisa menyempatkan diri berolahraga, aktivitas yang menjadi hobinya. Kebugaran tubuh selalu dijaganya. Berolahraga sebetulnya sudah jadi keseharian Lodewijk sejak masih di dinas militer. Hingga sekarang tubuhnya masih terlihat tetap ideal.

Satu lagi hobi yang tidak pernah ia tinggalkan, yaitu menembak. Ini jadi kegemarannya sendiri. Hobi yang satu ini terus membekas dari masa aktif menjadi tentara di Kopassus dulu. Menembak sama dengan melatih

insting. “Ketika saya masih Letnan, saya bisa melepaskan 10 butir peluru dalam 9 detik dengan sasaran kepala berjarak 20 meter,” ungkapnya, mengenang masa latihan menembak di Kopassus.

Kini, di usianya yang sudah 64 tahun, Lodewijk masih hobi menembak walau matanya sudah berkacamata plus. Begitulah keseharian Lodewijk. Walau waktunya banyak tersita sebagai pejabat negara, tapi di rumah ia tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Di rumahnya ada istri dan dua anak. Anak

pertama mengikuti jejaknya berkarir di militer. Anak kedua kuliah di Universitas Indonesia jurusan Bisnis Internasional.

“Saya menikah agak telat, saat saya berpangkat Mayor, tahun 1995. Waktu itu, usia saya 38 tahun. Usia 41 tahun baru punya anak. Dan anak pertama mau masuk AKMIL dan sudah lulus 2020 lalu. Anak kedua kuliah di jurusan Bisnis Internasional dengan double degree. Separuh waktu kuliahnya di Indonesia, separuh lagi di Amsterdam, Belanda,” tutupnya. • mh/es

SATU LAGI HOBİ YANG TIDAK PERNAH IA TINGGALKAN, YAITU MENEMBAK. INI JADI KEGEMARANNYA SENDIRI. HOBİ YANG SATU INI TERUS MEMBEKAS DARI MASA AKTIF MENJADI TENTARA DI KOPASSUS DULU.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus. Foto: Faisal/Man



# Dukung Penyiaran Digital dan Penguatan TNI

Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke tiga daerah guna mendalami berbagai isu yang memang menjadi ranah kewenangannya. Seperti yang dilakukan di Sumatera Selatan, Komisi I mendalami isu penyiaran digital.

**K**etua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid mengapresiasi dan siap mendukung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Sumatera Selatan dalam melakukan migrasi pada televisi dari penyiaran analog menjadi digital atau *analog switch off* (ASO). Terlebih, TVRI sebagai penyelenggara publik milik negara ini diharapkan turut terlibat membantu program pemerintah melakukan *switch off* dari analog ke digital.

“Jadi kesiapan (melakukan ASO) sudah siap, terutama TVRI Sumatera

Selatan. InsyaAllah (TVRI Sumsel) siap mendukung program ASO atau digitalisasi penyiaran,” ujar Meutya usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi I DPR RI dengan jajaran direksi LPP TVRI di Palembang, Sumatera Selatan, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut melanjutkan, bahwa DPR RI mendukung upaya-upaya yang berkaitan dengan kesiapan migrasi tersebut seperti infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, DPR RI juga akan mengupayakan pembagian perangkat *set top box* (STB)

untuk masyarakat yang tidak mampu agar masyarakat dapat menikmati televisi digital.

“(Pembagian perangkat STB) itu sedang kita bicarakan dan nanti kan hasil kunjungan ini kami bahas kembali di pusat, di Jakarta. Jadi bagaimana nanti kita masih menunggu rapat berikutnya nanti di Jakarta dengan TVRI pusat dan juga Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi),” sambung Meutya.

Legislator dapil Sumatera Utara I tersebut menjelaskan, yang menjadi perhatian dalam migrasi televisi ini adalah bagaimana digitalisasi tersebut diiringi dengan kualitas siaran yang lebih baik lagi dan lebih variatif.

Menurut Meutya, migrasi dari analog ke digital merupakan hal yang tidak bisa dihindari, bahkan Indonesia itu termasuk yang tertinggal dalam menyelenggarakan digitalisasi ini. “Nanti kalau dunia semua sudah TV digital, Indonesia tidak akan tertinggal. Jadi itu pentingnya bukan hanya bagi pemerintah, tapi bagi masyarakat untuk dapat menikmati teknologi penyiaran terbaru,” tutupnya.

## TNI HARUS KUAT

Di Padang, Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan, pihaknya menginginkan TNI yang kuat. Karena itu, Komisi I DPR RI akan mendorong penambahan anggaran Lantamal II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai konsekuensi atas penambahan personel, sarpras, alutsista, serta harwat.

“TNI yang kuat bukan hanya dari anggaran yang hebat saja, tetapi juga dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Nah, di sini (Lantamal II Padang), saya lihat komandan-komandannya baik sekali dalam melatih para prajuritnya,” ungkap Utut usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dengan Komandan Lantamal II Padang di Mako Lantamal II Padang, Sumatera Barat.

Ditegaskan Utut, salah satu tugas Komisi I DPR RI yaitu mengalokasikan



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid bertukar cendera mata dengan direksi LPP TVRI di Palembang, Sumatera Selatan.  
Foto: Hira/Man





Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto Utut saat memimpin pertemuan dengan Komandan Lantamal II Padang di Mako Lantamal II Padang, Sumatera Barat. Foto: Husen/Man

anggaran yang lebih baik guna mengoptimalkan kinerja TNI. “Memang kita pahami, anggaran yang digelontorkan di sini (Lantamal II) masih relatif sangat kecil. Meskipun memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran, Lantamal II telah menunjukkan kinerja yang sangat baik,” ucap utut.

Di sisi lain, politisi dapil Jawa Tengah VII itu mengapresiasi Lantamal II Padang yang telah terlibat aktif dalam mendukung program vaksinasi, program tangkal radikalisme, dan juga penanganan terutama peningkatan kesehatan masyarakat.

**APRESIASI KINERJA KOREM WIRA BHAKTI NTB**

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono memberikan apresiasi kepada Komando Resor Militer (Korem) 162/ Wira Bhakti di NTB atas kinerjanya menjaga pertahanan, keamanan, bahkan sosial kemasyarakatan. Komisi I DPR RI juga merespon positif semua usulan yang disampaikan jajaran Korem Wira Bhakti.

Tidak saja kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Komisi I

juga mengapresiasi Korem Wira Bhakti yang mampu meredam radikalisme dan terorisme dengan pendekatan yang lebih *soft (preventif)*.

“Komisi I DPR RI mengapresiasi penjelasan Danrem 162/Wira Bhakti tentang kesiapan alutsista dan sarana-prasarana satuan jajaran Korem 162 serta permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pokok TNI dan peran Korem 162 dalam mencegah radikalisme dan terorisme di Provinsi NTB,” ungkap Bambang.

Tidak sampai di situ, Bambang juga mengapresiasi Korem Wira Bhakti yang proaktif membantu vaksinasi untuk mengatasi Covid-19 dan membantu masyarakat korban bencana alam. Kasus Covid-19 di NTB hingga 19 Desember menunjukkan 0 kasus dari sebelumnya ratusan kasus. Begitu juga dukungan Korem Wira Bhakti sangat baik dalam mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan wisata strategis.

“Tim Kunker Komisi I DPR RI meminta kepada Danrem 162/Wira Bhakti untuk membuat laporan tertulis mengenai alutsista, data perumahan, dan uang lauk pauk di Satuan Jajaran Korem 162. Komisi I DPR juga telah mendengarkan usulan kebutuhan dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan Korem 162 untuk melaksanakan tugas,” tutur Bambang.

Politisi Partai Gerindra ini melanjutkan, kebutuhan untuk peningkatan kemampuan itu di antaranya pembentukan satuan operasional yang memiliki alutsista dan kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan pengamanan even berskala besar, pengamanan VVIP, dan pengamanan obyek vital nasional. Korem 162 juga butuh dukungan anggaran dana kontigensi untuk menangani bencana alam di NTB. ● hnm,hal,mh/es



Foto bersama Tim Kunker Komisi I DPR RI di Makorem 162/WB NTB. Foto: Hanum/Man



# Potensi Masalah Pemilu 2024 Harus Diantisipasi

Dua tahun lagi, Bangsa Indonesia ini akan dihadapkan pada pesta demokrasi. Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Jawa Barat meminta agar penyelenggara pemilu mulai memetakan berbagai potensi permasalahan untuk segera diantisipasi sedini mungkin.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu Jawa Barat. Foto: Andri/Man

**W**akil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan, pelaksanaan Pemilu serentak 2024 masih dihadapkan beberapa potensi permasalahan di antaranya terkait distribusi logistik Pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan akhir Pilpres. Selain itu juga ada kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.

“Kita melihat contohnya pada Pemilu 2019, berkaitan dengan lembaran

kertas surat suara Caleg dan Pilpres yang banyak. Hal itu kemungkinan juga akan kita hadapi, apalagi tahun 2024 dilaksanakan juga Pilkada meski bulannya berbeda,” kata Saan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu Jawa Barat, di Aula Kantor KPU Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

Potensi masalah lainnya yakni pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di tengah pandemi Covid-19. “Karena pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan di tengah pandemi, maka penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu dalam menyusun

anggaran juga harus memperhatikan proses (protokol kesehatan) dan APD (Alat Pelindung Diri) untuk seluruh pengawas Pemilu,” tandas politisi Partai NasDem itu.

Terkait tingginya beban kerja penyelenggara Pemilu, khususnya penyelenggara di tingkat TPS, Saan menilai akan berimbas pada keengganan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi petugas TPS.

Sedangkan terkait kekurangan tenaga ASN di KPU dan Bawaslu Jabar, Saan mengatakan hal ini akan menghambat jalannya persiapan Pemilu 2024. Untuk itu, Komisi II DPR RI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian terkait adanya irisan tahapan penyelenggaraan antara Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024 yang akan berjalan bersamaan hal ini dinilai akan mengakibatkan konsentrasi penyelenggara terpecah. Terakhir, kata Saan, pengalaman 2019 semoga tidak terjadi lagi adanya DPT hasil perbaikan sampai tiga kali.

## APRESIASI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI SUMUT

Di Sumatera Utara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengapresiasi program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam melaksanakan implementasi reformasi birokrasi, melalui sistem digitalisasi *e-government*. Dimana, *e-government* sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan berbasis teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat melalui pelayanan *online* atau daring.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang usai pertemuan Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumut, di Kantor Gubernur Sumut. Foto: Rumi/Man

“Dengan demikian saya menilai positif program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumut, dengan menggaungkan sistem digitalisasi berbasis *e-government*. Melalui sistem *e-government*, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah,” kata Junimart usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumut beserta jajarannya, di Kantor Gubernur Sumut baru-baru ini.

Junimart berharap dengan adanya sistem digitalisasi di Sumut, seluruh program dan kinerja tingkat provinsi, kabupaten/kota, bisa terintegrasi secara baik dan terkontrol. Sehingga tidak membuat hambatan yang lebih besar dalam pelayanan kepada masyarakat. Diakui Junimart, penerapan sistem digitalisasi akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar, karena menggunakan perangkat canggih pada sistem tersebut.

### **APRESIASI CAPAIAN KANWIL BPN JATIM**

Saat memimpin Tim Kunjungan Kerja di Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengapresiasi kinerja

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN Kanwil) Jatim yang capaiannya 90 persen di setiap Program Strategis Nasional.

“(Program) ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, bahkan Kanwil Provinsi Jawa Timur capaian tertinggi se-Indonesia, saya apresiasi sebesar-besarnya,” ungkap Luqman usai pertemuan dengan Kepala Kanwil

BPN Jawa Timur beserta jajarannya di Surabaya, Jatim.

Luqman mendorong BPN Jatim untuk terus menggencarkan program strategis nasional, khususnya terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mengingat PTSL adalah program yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. “Ini perlu terus dilakukan karena pentingnya legalitas bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah agar tidak menjadi sasaran empuk mafia tanah,” katanya.

Disampaikan Luqman, dalam percepatan PTSL, pemerintah berpegang pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dan SKB 3 Menteri (ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian Desa) Tahun 2017. “Dua aturan ini menginstruksi pemerintah pusat kepada bupati/wali kota agar membantu mensukseskan percepatan PTSL dengan cara membantu biaya pra PTSL agar tidak membebani masyarakat, dan membantu dalam hal pengurangan atau pembebasan BPHTB,” terangnya.

“Saya berharap selama regulasi belum dicabut para kepala kantor bekerjasama dengan Anggota DPR untuk komunikasi ke pemda setempat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat,” sambung Luqman.

● man,rni,rnm/es



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim saat memimpin pertemuan dengan Kakanwil BPN Jawa Timur di Surabaya, Jatim. Foto: Ria/Man

# Usulkan Napi Narkoba Dibina Terpisah

Komisi III DPR RI sangat konsen dalam memberantas peredaran narkoba. Terutama di lembaga pemasyarakatan. Dalam rangkaian Kunjungan Kerja di Kendari Sulawesi Tenggara, Komisi III DPR RI mengusulkan agar narapidana kasus narkoba dibina terpisah dengan narapidana lainnya.

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan, salah satu alasan pentingnya pemisahan warga binaan kasus narkoba adalah untuk memutus rantai pengguna.

“Saya kira penting untuk memisahkan napi narkotika. Ini penting bagi kami Komisi III DPR RI untuk memperhatikan dan mendalami lagi,” tegas Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini

di Kendari, Sultra, belum lama ini.

Selain itu, Pangeran juga memberikan perhatian khusus masalah over kapasitas di lapas. Dirinya merespon positif rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus kasus narkoba di Sulawesi Tenggara sehingga tidak bergabung dengan perkara lainnya. “Pada prinsipnya, (permasalahan) di Kemenkumham yang sudah klasik terjadi adalah over kapasitas lapas. Begitu pula di Sultra, selayaknya dibuatkan lapas

khusus narkotika,” ungkap Pangeran.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba merasa bangga atas perhatian Komisi III DPR RI untuk jajarannya. Ia berharap kehadiran Komisi III DPR RI membawa perubahan positif pada jajarannya di Kanwil Kemenkumham Sultra. “Kami sangat bangga karena telah memberikan solusi dan penguatan-penguatan terkait dengan tugas dan fungsi kami,” ujar Silvester.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sultra Muslim menyebutkan setidaknya dua lapas untuk mengatasi kelebihan kapasitas daya tampung narapidana yang jumlahnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Sekarang ini jumlah narapidana di lapas dan rutan sebanyak 2.882 orang, sementara daya tampung sekitar 900 orang,” kata Muslim.

## APRESIASI SINERGI DITNARKOBA POLDA BANTEN DENGAN BNN

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa mengapresiasi sinergi yang ditunjukkan Ditnarkoba Polda Banten dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanganani kasus penyalagunaan narkoba. Menurutnya, langkah preventif sangat dibutuhkan untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba, yang berujung pada permasalahan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Hal itu disampaikan Desmond saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolda Banten Rudy Heriyanto beserta jajaran, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banten Hendri Marpaung beserta jajaran, di Aula Serbaguna Polda Banten, Kota Serang, Banten.

“Saya mengapresiasi kinerja Ditnarkoba Polda Banten yang mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Namun, kami juga mengingatkan agar Ditnarkoba dan BNN aktif mencari tahu sumber barang haram tersebut berasal dari luar atau



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh di Kantor Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Foto: Eko/ivi





Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa. Foto: Anne/nvi

diproduksi di wilayah Banten apabila barang tersebut berasal dari luar agar dicegah masuk ke wilayah Banten,” ujar Desmond.

Desmond menjelaskan pencegahan *over kapasitas* di lapas merupakan cerminan dari penindakan semakin berkurang bukan semakin bertambah. Dengan demikian, langkah preventif dapat dikatakan berhasil. “Semoga ke depan masalah *over kapasitas* Lapas sebagai cermin penindakan semakin berkurang bukan bertambah,” harap politisi Partai Gerindra itu.

Desmond menambahkan, perlu perubahan paradigma dalam penanganan kasus narkoba. Sehingga tidak lagi menitikberatkan pidanaan kepada pengguna narkoba, yang berujung pada masalah *over kapasitas* lapas.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto menyampaikan aspirasi dan usulan terkait jumlah personel Polda Banten yang masih jauh dari angka ideal. Ia berharap mendapat dukungan dalam penambahan anggaran untuk rekrutmen personel Polda Banten.

“Saya berharap dengan adanya dukungan dari Komisi III DPR RI dapat

menyelesaikan permasalahan terkait kekurangan jumlah personel, karena Polda Banten belum mencapai jumlah personel yang ideal,” tutup Rudy.

### **STERILKAN PINTU MASUK INDONESIA DARI KEPRI**

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan pintu masuk Kepri harus steril dari Covid-19. Mengingat, Kepri saat ini merupakan satu-satunya pintu masuk ke Indonesia. Salah

satu permasalahan yang ia soroti di Kepri adalah terkait kedatangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia.

“Sekarang ini dikanalisis hanya satu pintu masuk yaitu melalui Kepri. Hal ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kepri sendiri, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama dan Pemerintah Indonesia, karena pintu masuknya di sini jadi mereka harus betul-betul steril dari Covid-19,” ujar Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mapolda Kepri, Batam.

Ia menegaskan, Komisi III DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengingatkan kepada Duta Besar Indonesia yang berada di Malaysia, agar mengantisipasi dan memperhatikan para pekerja migran benar-benar bebas dari Covid-19. Supaya para PMI bisa kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya dengan selamat.

Tak hanya itu, Adies juga mengingatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) akan kerawanan masuknya narkoba dari negara tetangga. “Jadi kami juga mengingatkan agar perlu diperhatikan jalur-jalur tikus yang biasa dilewati oleh para pengedar,” ujar Adies. ● eno,ann,eko/es



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mapolda Kepri. Foto: Kresno/nvi

# Awasi Sumber Daya Kelautan dan Pangan Rakyat

Pengawasan terhadap sumber daya kelautan, bahan pangan dan isu lingkungan menjadi fokus utama dari kunjungan kerja (kunker) reses Komisi IV DPR RI kali ini. Mulai dari mengunjungi Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), meninjau bahan pangan yang dijadikan bantuan sosial (bansos) hingga menilik pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

**S**oal sektor kelautan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono memimpin langsung Tim Kunker Komisi I DPR RI PSDKP di Balikpapan, Kalimantan Timur. Komisi IV melihat secara langsung infrastruktur sarana dan prasarana

Satwas serta menyerap aspirasi dari berbagai pihak terkait.

“Jadi kami mendengarkan penjelasan dan berdialog langsung terkait kinerja Satwas PSDKP Balikpapan dalam upaya penanggulangan dan penindakan IUU *Fishing*,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI di sela-sela memimpin

pertemuan Tim Kunker Komisi IV DPR RI dengan jajaran PSDKP di Balikpapan, Kaltim.

Komisi IV DPR RI kali ini turut menyerap aspirasi dari *stakeholder* dalam rangka penguatan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Kaltim. Salah satu isu yang masih menjadi masalah ialah aktivitas *illegal fishing* di perairan Indonesia, khususnya di kawasan Kaltim yang masih terjadi.

Padahal kata Budi, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya praktik terlarang tersebut. “Pencurian ikan yang bersifat lintas batas tidak semata-mata menjadi persoalan negara Indonesia saja, tetapi menjadi persoalan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono saat meninjau PSDKP Balikpapan, Kalimantan Timur. Foto: Agung/Man





Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Foto: Ridwan/Man

bersama antarnegara,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Sehingga Budi berpesan agar pegawai PSDKP dapat menjadi pengayom dan pelindung kepentingan nelayan Indonesia agar tercipta suasana yang kondusif. “Pengawasan SDKP diharapkan tetap konsisten dalam menindak tegas bentuk pelanggaran kapal yang melakukan IUU Fishing selama ini,” pungkasnya.

#### **BAHAN PANGAN**

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai perlu ada kebijakan untuk menjadikan telur dalam salah satu menu makanan pada bantuan sosial (bansos) yang dibagikan kepada masyarakat atau pengungsi setiap kali ada bencana alam di Indonesia.

“Pak Presiden Jokowi juga minta agar telur ini bisa dijadikan salah satu menu untuk bansos. Kalau bicara tentang generasi ke depan, malah (telur) justru bagus untuk pencegahan stunting,” jelas Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Akan tetapi ia tetap mengingatkan menu tersebut harus turut perhatikan kearifan lokal atau kebiasaan konsumsi

makanan di masing-masing wilayah Tanah Air. Sebab di kasus yang berbeda, masyarakat Indonesia di bagian timur mungkin lebih sering konsumsi ikan dibandingkan telur.

Maka, bansos yang diberikan bukan telur, melainkan ikan sesuai kebutuhan. “Kami usulkan hal ini. Seharusnya bisa diterima. Menurut saya penting itu. Jadi, bansosnya harus disesuaikan dengan masyarakat lokal. Harusnya bisa begitu,” tegas Anggota Dewan dari Fraksi PKB itu.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan tidak bisa menyerap telur ayam sebagai bagian dari bansos non-tunai. Hal itu karena regulasi anggaran bansos dari Kemensos hanya untuk belanja beras. Meskipun demikian, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memiliki rencana agar telur ayam tersebut dapat diserap untuk kebutuhan bencana.

#### **PENGELOLAAN SAMPAH**

Di lain kesempatan, Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar menyampaikan harapan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat menjadikan TPA Sekoto di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai proyek percontohan (pilot project) pengelolaan

sampah kolaboratif. Yaitu, antara masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

“Kalau kita orientasi pengelolaan sampahnya yang besar-besar seperti ke Korea, mungkin tidak cocok juga dibawa ke sini. Kalau bisa sampah itu diselesaikan di kabupaten. Sehingga yang terlibat selain pemerintah pusat juga ada pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Mindo saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke TPA Sekoto.

Karena itu, selain TPA di Kediri, ia juga mendorong agar Komisi IV DPR RI memperkuat kemitraan dengan KLHK agar menjadikan pula di pengelolaan sampah kolaboratif seperti yang sudah berjalan di TPA Kabupaten Mojokerto. Jika dua daerah ini dapat dijadikan contoh, menurut Mindo, maka program-program dari kementerian teknis terkait dapat didorong ke sana.

“Ini akan jadi nilai tambah ekonomi untuk masyarakat sekitar TPA. Yang boleh olah sampah-sampah plastik itu hanya masyarakat sekitar, karena mereka sudah berkorban untuk menjadikan wilayahnya untuk jadi tempat pembuangan sampah. Ini kompensasi bagi mereka,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. ● ah,rda/es

# Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke beberapa daerah memastikan kinerja para mitra kerja dalam melakukan pembangunan infrastruktur di daerah berjalan maksimal dan manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

**D**i Provinsi Papua Barat, Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau progres pembangunan *Sport Center* di Universitas Papua (Unipa), Manokwari, Papua Barat. Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik, menekankan bahwa dalam setiap pembangunan di Papua Barat semestinya tidak menghilangkan ciri khas kedaerahannya. Menurutnya, hal itu akan menjadi identitas tersendiri. “Jangan sampai kita terus-menerus mengadopsi konsep modern, sementara ciri khas kita di sini

lama-lama hilang,” tutur Willem saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI di Manokwari, Papua Barat, baru-baru ini.

Secara umum Komisi V DPR RI mengapresiasi pembangunan *Sport Center* di Unipa tersebut. Komisi V DPR berharap proyek senilai Rp134 miliar tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memupuk prestasi, baik mahasiswa maupun masyarakat Papua Barat secara umum.

Di sisi lain, Komisi V juga menyoroti pembangunan Bandar Udara Rendani di Manokwari. Salah satu catatan

penting yang menjadi sorotan ialah ukuran landasan pacu atau *runway* yang hanya berukuran 2000 x 45 meter. Padahal, ukuran *runway* sangat memengaruhi keselamatan dan membatasi pesawat besar yang akan masuk ke Papua Barat.

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana untuk perpanjangan *runway* Bandara Rendani ini, sehingga memiliki panjang sekurang-kurangnya 2500 meter.

## **DORONG AKSELERASI PEMBANGUNAN PENYANGGA IKN**

Anggota Komisi V DPR RI Irwan mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Menurutnya, Kutai Timur sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru nantinya perlu menyiapkan berbagai hal baik dari segi infrastruktur, maupun Kutai Timur sebagai pusat produksi pertanian dan pariwisata.

“Kutai Timur sudah pasti ya menjadi penyangga IKN, makanya kita siapkan dulu terkait konektivitas moda transportasi dan infrastrukturnya sambil menyiapkan Kutai Timur sebagai pusat produksi pertanian dan juga pariwisata,” ujarnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas di Kantor Bupati Kutai Timur, Kaltim.

Dari sisi pertanian dan pariwisata, Irwan mengatakan Kutai Timur saat ini sedang dalam pembangunan daerah irigasi di beberapa daerah serta pembangunan akses-akses jalan



Tim Kunker Komisi V DPR RI foto bersama dengan perwakilan Pemprov Papua Barat. Foto: Eki/ivi





Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat pertemuan Tim Kunker Reses Komisi V di Kaltim. Foto: Bianca/mvl

menuju daerah pariwisata. Untuk itu, adanya infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, terminal dan peningkatan ruas jalan menjadi sangat penting.

“Posisi Kutai Timur sebagai daerah penyangga IKN juga terkait dengan industri. Makanya adanya pelabuhan juga menjadi sangat penting ya, beberapa kawasan industri di sini kan sudah ditetapkan, tadi ada (industri) semen, kemudian ada metanol,” sambung politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, luas wilayah Kutai Timur yang sangat luas, menurut Irwan, juga memerlukan konektivitas yang lebih mudah, guna menghubungkan Kutai Timur dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Kaltim.

Ke depan, legislator dapil Kaltim ini berharap, kunjungan dari Komisi V DPR RI ke Kutai Timur tersebut dapat berdampak terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur di Kutai Timur. Mengingat, posisi Kutai Timur sebagai daerah penyangga IKN.

### **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DEMI KEMAKMURAN MASYARAKAT**

Di Aceh, Tim Kunker Komisi V DPR juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi. Karena tanpa infrastruktur

yang diiringi dengan transportasi memadai, masyarakat Aceh akan sulit untuk hidup makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPR RI Sofyan Ali meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mempercepat pengembangan pembangunan fasilitas Bandara Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh.

Pengembangan pembangunan berupa perpanjangan landasan terbang atau runway bandara menjadi krusial untuk membuka akses penerbangan

yang lebih mudah dijangkau oleh berbagai jenis pesawat komersial. Dengan kehadiran infrastruktur transportasi yang lengkap, dirinya berharap bisa mendorong pergerakan ekonomi untuk masyarakat Aceh tanpa terkecuali.

“Sebelumnya (Bandara Malikussaleh) telah menyiapkan landasan pacu yang relatif cukup memenuhi syarat mendarat pesawat jenis ATR dengan beban maksimum. Saya harap dengan rencana perpanjangan landasan ini bisa mendaratkan berbagai pesawat komersil,” ucap Sofyan Ali.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra. Dirinya mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi di seluruh wilayah Aceh terlaksana tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat. Ia menekankan sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“*Master plan* Aceh ini mau dibawa kemana. Visi Aceh kedepan ini, wisatanya *gimana*, bagaimana pertaniannya harus maju. Lalu, jangan lupa soal industrinya. Tiga hal itu direncanakan, dicoba, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik, saya yakin Aceh akan lebih makmur ke depan,” tandasnya. ● eki,bia,ts/es



Anggota Komisi V DPR RI Sofyan Ali saat mengikuti Kunker Komisi V ke Aceh. Foto: Saum/mvl

# Libatkan UMKM dalam Peningkatan Investasi



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI. Foto: Novel/nvi

Komisi VI DPR RI, dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya di Batam, meminta agar pemerintah melibatkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya meningkatkan sektor investasi di Batam.

**W**akil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta Kementerian

Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Badan Pengusahaan (BP) Batam dan investor di Batam untuk dapat melibatkan pelaku sektor UMKM dalam kegiatan investasi di Kota Batam. Hal tersebut penting dilakukan guna mendorong penyebaran dan pemerataan investasi yang berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Demer, sapaan akrabnya, saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI mitra kerja di Kota Batam, Kepulauan Riau, belum lama ini. Ia menilai kemajuan dalam investasi tidak akan ada artinya jika tanpa melibatkan UMKM serta masyarakat di Batam.

“Ada potensi yang luar biasa di Pulau Batam, karena (letaknya) sangat berdekatan dengan Singapura, sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi investasi di Batam. Kemajuan Batam dan investasinya tentu ini kami

sangat hargai,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Kepada BP Batam dan investor yang hadir di Batam, Demer meminta agar melibatkan banyak mungkin UMKM di daerah Batam. “Karena percuma kemajuan atau investasi yang banyak tanpa melibatkan banyak UMKM, serta masyarakat di Batam,” tegasnya.

## SOROTI *OVERSUPPLY* DAN HARGA SEMEN

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menyoroti persoalan *over supply* kelebihan pasokan kapasitas produksi semen oleh PT Semen Indonesia Group (Persero) Tbk dan juga perbedaan harga semen lokal yang lebih mahal dari semen produksi asing.

“Hari ini kita bicara dengan 3 BUMN dan 2 kementerian, pertama yang menarik adalah dengan Semen Indonesia (PT Semen Indonesia Group) sebagai *holding*, yang kita tahu (produksi) semen ini sampai sekarang kan *over supply* dan kita belum tahu sampai kapan *over supply* ini akan berakhir. Jika *supply*-nya (sudah) menjadi normal tetapi faktanya adalah harga semen itu tidak turun padahal produknya adalah produk komoditas,” ungkap Harris di Batam, Kepri.

Politisi PDI-Perjuangan tersebut juga meminta penjelasan bagaimana antisipasi yang akan dilakukan PT Semen Indonesia Group dalam melihat kondisi saat ini ketika ada perusahaan semen luar negeri masuk dan harga produksi semen mereka lebih murah daripada harga semen dalam negeri.

Ia juga mempertanyakan dengan adanya aksi korporasi akuisisi PT Holcim Indonesia pada tahun 2019 apakah menciptakan suatu nilai bagi perusahaan/*creating value*. Yang mana, *creating value* sendiri adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan.





Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI. Foto: Novel/nvi

### **DORONG PERHUTANI ADAKAN TERMINAL BAHAN BAKU KAYU**

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mendorong BUMN, khususnya Perum Perhutani untuk meningkatkan *support* terhadap sektor-sektor privat, terutama dalam peningkatan sektor bahan baku melalui adanya terminal bahan baku. Mengingat, hingga saat ini masih terdapat adanya kendala bahan baku dari industri per kayu yang sedang mengalami tren peningkatan permintaan di sektor kebutuhan ekspor.

Demikian disampaikan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan para mitra kerja di Solo, Jawa Tengah.

“Sekarang ini, yang masih mengalami kendala adalah keinginan kawan-kawan industri per kayu untuk mendapat kemudahan dalam mendapat bahan baku. Apalagi, sektor per kayu mengalami peningkatan permintaan ekspor karena ada perang dagang antara Amerika dan China yang akhirnya kita mendapatkan benefit dari posisi ini. Sehingga, jangan sampai *opportunity* ini

terkendala oleh *supporting* bahan baku yang sebagian besar untuk pengrajin kayu adalah dari Perhutani

dan sebagian juga dari kawan-kawan PTPN,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut mengingatkan Perum Perhutani untuk segera meningkatkan transformasi digitalisasi yang dinilai sangat penting. Tujuannya, agar perencanaan penebangan kayu maka para produsen ini bisa lebih cepat dalam menghitung perjanjian dan kesepakatan dengan para *buyer*.

“Karena kecepatan *buyer* dan *user* tidak bisa *delay*, kalau bahan baku ini tersendat ini bahaya dan ini yang dikeluhkan oleh kawan-kawan pengrajin kayu. Selain itu, dibutuhkan adanya terminal bahan baku yang transparan dan bisa diakses supaya perencanaan-perencanaan terhadap kebutuhan kayu bisa diantisipasi untuk produksi yang sebagian besar juga untuk kebutuhan ekspor. Inilah saatnya momentum kita mengambil peluang ini untuk pasar dalam negeri dan luar negeri,” pungkas legislator dapil Jateng V itu. ● nvl,pun/es



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan dengan Mitra Kerja di Solo, Jateng. Foto: Puntho/nvi

# Dukung Pembangunan Smelter dan Pemberantasan *Illegal Mining*

Komisi VII DPR RI mengirimkan tiga tim Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat guna menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya di penghujung tahun 2021.

**D**i Gresik, Jawa Timur, Komisi VII DPR RI mendukung pembangunan *smelter* PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dari hasil peninjauan dan penjelasan dari Direktur Utama, diketahui progres pembangunan *smelter* PTFI saat ini sudah mencapai 12 persen.

“Kami melihat keseriusan pembangunan PTFI untuk membangun smelter sudah terbukti. Apalagi kita juga tahu beberapa waktu lalu *groundbreaking* dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo,” papar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Bambang Haryadi ketika memimpin Komisi VII DPR meninjau progres pembangunan *smelter* PTFI.

Bambang meminta kepada Pemerintah Kabupaten Gresik agar memberikan fasilitas pendukung pembangunan *smelter* PTFI. “Seperti kita lihat akses jalan menuju lokasi ini sangat *crowded*, karena salah satu penunjang pembangunan kawasan industri adalah infrastruktur jalannya. Harapan kami juga, pembangun smelter PTFI ini dapat menyerap tenaga kerja lokal, sebagaimana amanat undang-undang bahwa kekayaan alam harus dikelola di negeri kita sendiri, yang mana itu akan terlaksana,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

## REKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN NOMENKLATUR BARU UNTUK BERANTAS ‘ILLEGAL MINING’

Maraknya *illegal mining* (pertambangan ilegal) di sejumlah daerah, tak terkecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur, membutuhkan tindakan untuk mengatur, bahkan menindaknya. Pasalnya, selain membuat negara kehilangan potensi penerimaan negara, juga merugikan fasilitas umum di sekitarnya, lantaran tak sesuai dengan aturan. Bahkan, akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut, turut berimplikasi kerugian terhadap daerah, baik pendapatan daerah maupun kesempatan masyarakat setempat.

“Salah satu rekomendasi kami, mengusulkan untuk nanti dari Kementerian ESDM ke depan itu membentuk sebuah nomenklatur baru, yaitu Dirjen Penegakan Hukum, khusus di pertambangan mineral dan batu bara kita. Artinya apa? Ada sebuah institusi negara yang bisa melakukan langkah-langkah memindahkan terhadap praktek-praktek penambangan ilegal yang ada di negara kita, dalam upaya mendorong percepatan peningkatan pendapatan negara,” jelas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman.

Maman mendapati informasi, terkait aktivitas pertambangan dan energi khusus di wilayah Kukar, ada beberapa isu praktek *illegal mining* yang tidak sesuai dengan aturan terjadi di Kukar yang akhirnya menyebabkan kerugian negara. Untuk itu, politisi Partai Golkar itu mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor tambang, dimana dengan pemberian kesempatan pengelolaan potensi



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi ketika meninjau progres pembangunan smelter PTFI di KEK Gresik. Foto: Ica/mv





Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI. Foto: Sofyan/nvl

tambang kepada masyarakat daerah, pengusaha lokal, perusahaan swasta, BUMD hingga BUMN, sepanjang pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berkomitmen untuk bekerja secara benar dan dapat memberikan kemanfaatan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Christy Barends menilai terdapat beberapa persoalan yang cukup serius terkait pertambangan di Kukar. Pertama berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kemudian izin tersebut tidak digunakan oleh perusahaan yang mendapatkan IUP. Bahkan pelaku-pelaku usaha pertambangan ilegal malah memanfaatkan izin yang dikeluarkan ini.

“Saya istilahkan ini izin *bodong*. Sesungguhnya maksudnya ada izin yang tidak dimanfaatkan atau (pemerintah) mengeluarkan izin (IUP), tetapi tidak ada batu baranya di situ. Kan lucu sekali. Mestinya ada riset-riset awal untuk memastikan dari ketersediaan kandungan batu baranya berapa banyak, baru kemudian izin dikeluarkan. Jadi terhadap situasi itu, kami menganggap bahwa ini memang kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang mestinya tidak boleh terjadi,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.

**KETERSEDIAAN VAKSIN, KUNCI PEMUTUSAN RANTAI SEBARAN COVID-19**

Di penghujung tahun 2021, pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah mengupayakan berbagai macam cara untuk menghentikan pandemi, termasuk mengantisipasi munculnya varian-varian baru seperti Omicron yang baru-baru ini mulai terdeteksi masuk ke Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono mengungkapkan, ketersediaan dosis

vaksin menjadi kunci pemulihan yang riil untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Untuk itu, politisi Partai Demokrat tersebut menekankan agar PT Bio Farma harus bekerja lebih maksimal dalam melakukan proses produksi, uji klinis serta memastikan ketersediaan dan distribusi ke seluruh penjuru negeri.

“Proses produksi, uji klinis, hingga ketersediaan dan distribusi ke seluruh pelosok Indonesia hendaknya dilakukan semaksimal mungkin oleh Bio Farma dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam mendukung capaian program vaksinasi pemerintah,” tutur Sartono di Bandung, Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, saat ini Industri Farmasi Indonesia khususnya BUMN Farmasi sudah jauh tertinggal dibandingkan dengan farmasi swasta, apalagi dengan industri farmasi global. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ada dua hal yang harus dilakukan oleh Bio Farma untuk mengejar ketertinggalannya. Pertama, Bio Farma perlu mengembangkan industri farmasi berbasis herbal. Selanjutnya, yang perlu didorong kepada Bio Farma agar bisa mengurangi importasi bahan baku obat. ● [ica](#),[sf](#),[es](#)/[es](#)



Tim Kunker Komisi VII DPR RI foto bersama di depan laboratorium PT Bio Farma di Bandung, Jabar. Foto: Eman/nvl

# Serap Aspirasi dari Perguruan Tinggi Islam di NTB

Dalam rangka menyerap aspirasi di masa reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali. Di NTB, Komisi VIII menyerap aspirasi dari Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat mengikuti Kunjungan Kerja mengunjungi UIN Mataram. Foto: Jaka/nvi

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan, layanan 'UIN Care' yang dikembangkan oleh UIN Mataram ini bisa dijadikan contoh di setiap perguruan tinggi Islam se-Indonesia. Pasalnya, hal ini merupakan bagian dari keseriusan pihak kampus secara aktif ikut serta memerangi kekerasan seksual.

Hal tersebut diungkapkan Diah saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI mengunjungi UIN Mataram di Lombok, NTB. Menurutnya, 'UIN Care' yang diinisiasi oleh pihak kampus difokuskan untuk mengatasi

persoalan-persoalan internal. "Saya sangat merespon dengan baik atas pembentukan layanan ini," tegas Diah.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, 'UIN Care' ini nantinya berfungsi untuk menerima pengaduan-pengaduan semisal ada pelecehan di kampus. Melalui layanan ini nantinya akan ada pendampingan terhadap korban, khususnya secara psikologis.

"Saya cukup sangat mengapresiasi terhadap layanan ini. Bahkan UIN Mataram ini sudah bekerjasama dengan lembaga lain untuk tindak lanjutnya ke ranah hukum. Saya pikir ini bagus dan sudah sesuai dengan proporsinya dari dunia kampus merespon tindak

kekerasan seksual dan itu inisiatifnya juga dari internal kampus. Saya juga sangat senang dengan perkembangan dinamika atau penguatan sivitas akademika di UIN Mataram ini," ujar Diah.

Disampaikan Diah, dalam meningkatkan layanan 'UIN Care', pihak kampus menginginkan ada pendidikan konseling untuk pendampingan para korban. Tentu ini akan sangat membantu keahlian mereka dalam menangani para korban.

"Nanti mungkin saya juga akan bantu dengan jaringan-jaringan pemberdayaan perempuan yang juga sudah ada di Komisi VIII DPR, kita bisa saling berjejaring dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual," tukas Diah.

## PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA JUGA BUTUH PERHATIAN

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra mengatakan, program bantuan pemerintah terhadap kampus islam swasta di NTB saat ini masih minim, terutama di Universitas Islam Al-Azhar Mataram (UNIZAR). Walaupun begitu, pihaknya mengapresiasi selama ini kampus UNIZAR bisa menunjukkan kemandiriannya dengan tidak bergantung pada bantuan pemerintah.

"Pada umumnya kampus-kampus Islam yang seperti ini masih dianaktirikan dibandingkan dengan kampus-kampus yang non agama atau umum. Saya mengapresiasi para pengurus kampus UNIZAR masih tetap terus bekerja ikut serta berperan mencerdaskan anak-anak bangsa, walaupun bantuan dari pemerintah masih minim," ujar Nanang di UNIZAR, Lombok, NTB, baru-baru ini.





Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samudra saat mengikuti Tim Kunker Komisi VIII DPR RI di UNIZAR, Lombok. Foto: Jaka/nvl

Legislator dapil NTB II ini juga mengapresiasi, program inkubasi dari UNIZAR. Dimana, para mahasiswa yang lulus akan diberikan tempat untuk magang dan diberikan pembelajaran keahlian tertentu sehingga mereka bisa berkembang dan bisa diserap ke dunia kerja.

“Alhamdulillah dengan program tersebut, sharing pengalaman sesama teman sekelas dan para senior ini bisa memberikan efek positif yang bagus, sehingga lulusan di UNIZAR ini hampir tidak ada yang menganggur,” ucap Nanang.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga berharap, UNIZAR bisa menjadi inisiator utama mendidik para generasi pemuda islam menjadi *rahmatan lil alamin*. Senantiasa bekerjasama, bergotong royong, saling menghormati dan menghargai sesama, sehingga hidup itu bisa sejahtera dengan penuh berkah.

### SALURKAN BANTUAN ATENSI DI BALI

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Bali yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily yang didampingi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi

Bali I Dewa Gede Maendra Putra dan jajarannya menyerahkan paket bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi Penerima Manfaat (PM).

Bantuan Atensi yang diberikan tersebut berupa, 5 ekor sapi, 12 kursi

roda, 5 alat bantu dengar, 1 tongkat ketiak, 2 tongkat kaki tiga, dan 26 bantuan anak sekolah. Total jumlah bantuan yang disalurkan adalah senilai Rp93.610.000.

Ace menegaskan, Komisi VIII DPR memiliki tugas strategis. Dimana, salah satunya terkait penanganan Covid-19, termasuk dalam mengatasi dampak sosial pandemi dengan memberikan bantuan sosial (bansos). “Kami setuju dan dukung melalui Kemensos berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Ace di Desa layak anak Kesiman Kartalangu, Kota Denpasar.

Sementara itu, Kadinsos Provinsi Bali I Dewa Gede Maendra Putra menyampaikan bahwa penanganan masalah sosial di Bali melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk penanganan pandemi Covid-19, hal itu agar bisa berjalan dengan cepat. “Bantuan bagi warga yang membutuhkan bisa dilaksanakan melalui bantuan Atensi, sehingga bisa cepat dirasakan manfaatnya,” jelas Dewa. ● **jk,dep/es**



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily saat memberikan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai. Foto: Dewi/nvl

# Soroti Penanganan dan Pencegahan Stunting di Daerah

Komisi IX DPR RI menaruh perhatian khusus kepada pencegahan dan penanganan stunting di berbagai daerah. Begitupula pada Kunjungan Kerja kali ini, Komisi IX menggelar pertemuan dengan jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur dan Jambi bentuk pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan stunting di daerah.

**S**tunting (kekerdilan) atau tengkes masih menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi oleh Indonesia. Pemerintah menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen di tahun 2024, guna menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi keberhasilan Pemda Jombang, Jawa Timur dalam upaya penanganan permasalahan stunting. Keberhasilan itu ditunjukkan dari angka prevalensi stunting daerah tersebut yaitu sebesar 13,1 persen atau lebih rendah dari target nasional yang ditetapkan.

“Stunting yang sudah di bawah angka nasional. Ini menunjukkan progres penanganan stunting di Jombang sudah cukup bagus. Kita perlu apresiasi itu,” jelas politisi yang akrab disapa Ninik itu, usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan jajaran Pemda Jombang, di Jombang, Jawa Timur, baru-baru ini.

Selain terkait penanganan, ia juga mengapresiasi upaya pencegahan stunting yang dilakukan Pemda Jombang, terutama dalam



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh bertukar cinderamata usai memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI. Foto: Rizki/mvl

penyuluhan program Keluarga Berencana (KB). Sehingga daerah yang terkenal sebagai kota santri tersebut terpilih sebagai kota percontohan penurunan stunting dan program KB oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Ini perlu diapresiasi. BKKBN sebelumnya juga mengatakan akan menjadikan Jombang sebagai kota percontohan untuk penurunan stunting dan soal KB,” ungkap politisi Fraksi PKB ini.

## LAYANAN KESEHATAN HARUS LEBIH ADAPTIF

Terkait layanan BPJS Kesehatan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap layanan kesehatan di Indonesia dapat lebih adaptif, terutama dalam melayani masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut ia ungkapkan lantaran banyaknya keluhan mengenai program Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Di antaranya keluhan rumah sakit terkait pasien yang belum dapat membayar iuran dan keluhan dari masyarakat terkait kartu BPJS yang tidak dapat digunakan di beberapa rumah sakit.

“Harapan dari kunjungan ini, layanan kesehatan kita mampu lebih adaptif





Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin kunker reses Komisi IX DPR RI. Foto: Geraldi/mvl

dengan kondisi pandemi saat ini. Kita melihat komitmen dari berbagai pihak juga dari BPJS Kesehatan, mereka juga merespon, baik itu kepada institusi ataupun tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di tanah air,” kata Melki.

Dalam kunjungan tersebut, Politisi Partai Golkar tersebut juga menyoroiti isu stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta, menurutnya permasalahan tersebut dapat ditekan dengan adanya atensi khusus. Ia menilai sebisa mungkin untuk calon ibu ataupun orang tua dapat lebih perhatian agar dapat terhindar dari kondisi stunting.

### **KESEJAHTERAAN RELAWAN BKKBN DI DAERAH PERLU DIPERHATIKAN**

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroiti kesejahteraan tenaga relawan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya penanganan stunting diantaranya pendamping keluarga, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKLB) non ASN, dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) non-ASN.

Menurut Politikus PKS itu, perhatian pemerintah pusat terhadap jaminan kesejahteraan tenaga relawan BKKBN, dapat mendorong upaya pencegahan dan penanganan stunting secara masif, mengingat mereka merupakan

garda terdepan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan stunting di masyarakat.

“Kita minta kepada pemerintah pusat, BKKBN, agar memperhatikan kesejahteraan dari tenaga relawan, pendamping keluarga, PLKB non-ASN ataupun PKB non-ASN karena justru sebenarnya mereka inilah yang bergerak secara masif dari rumah ke rumah untuk melakukan edukasi,” tutur Mufida usai mengikuti pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Jambi beserta jajaran, di Jambi.

Ia meminta pemerintah pusat dan BKKBN agar dapat memperhatikan kesejahteraan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Jadi teman-teman ini harus diperhatikan kesejahteraannya. Kita mengusulkan teman-teman PKB yang non ASN ini yg benar-benar relawan harus dimasukkan ke PBI BPJS Kesehatan agar kesejahteraannya terlindungi,” pungkasnya. ● rr,nov,opi/es



Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati saat mengikuti pertemuan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI. Foto: Novel/mvl

# UMKM di Bali Perlu Diberi Stimulus

UMKM, Museum dan Desa Wisata Tematik menjadi konsen dari kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Bangkitnya sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 harus segera diwujudkan. Komisi X berpandangan, perlu beberapa stimulus agar UMKM kembali menggeliat.



Tim Kunker Komisi X DPR RI foto bersama dengan pegiat budaya Bali. Foto: Ayu/nwi

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Syaifudian mengapresiasi berbagai stimulus yang diberikan Pemerintah Provinsi Bali kepada para pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi di Bali.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang membolehkan para pelaku UMKM untuk menggelar kreasinya di Taman Werdhi Budaya Art Center Denpasar tanpa memungut biaya sedikit pun. Ini merupakan sebuah stimulus yang sangat baik kepada para pelaku UMKM

dan pengrajin untuk bangkit dari keterpurukan dari pandemi yang berkepanjangan,” ujar Hetifah kala memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Bali.

Hetifah juga berharap kebijakan khusus berupa stimulus juga diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Bali. Pasalnya lebih dari 60 persen perekonomian Bali mengandalkan sektor Pariwisata. Dan saat pandemi melanda, ditambah dengan kebijakan PPKM membuat pariwisata Bali bisa dikatakan mati suri. Padahal Bali bisa dikatakan sebagai wajah dari pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

Stimulus tersebut, menurut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, salah satunya bisa berupa pembebasan atau pemotongan tarif listrik bagi pelaku usaha kreatif. Hal tersebut tentu menjadi wewenang pemerintah pusat. Dengan begitu diharapkan akan menjadi angin segar yang bisa membangkitkan UMKM dan perekonomian setelah dihantam pandemi dua tahun terakhir ini.

## JADIKAN MUSEUM SEBAGAI PUSAT KEGIATAN BELAJAR

Sumatera Selatan terkenal dengan kekayaan sejarah, salah satunya adalah Rumah Limas yang berada di Museum Negeri Sumsel. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong agar museum bisa dijadikan pusat kegiatan belajar-mengajar terutama terkait dengan sejarah.

“Saya ingin museum dikemas menjadi pusat kegiatan belajar mengajar tentang sejarah, seperti rumah Limas yang ada di Museum Negeri Sumsel,” ucap Fikri saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI mengunjungi Museum Negeri Sumatera Selatan, di Palembang, Sumsel.

Fikri juga mengatakan dengan adanya museum ini, masyarakat bisa mengetahui banyak hal termasuk dari segi agama budaya dan etnis yang masuk di Sumatera Selatan. Dimana, terjadi akulturasi kebudayaan dengan masuknya pengaruh kebudayaan dari luar seperti Tiongkok, Arab dan India.

“Keindahan pengaruh-pengaruh budaya ini tidak perlu kemudian dinilai negatif. Ini adalah kekayaan bahkan menjadi khas Sumatera Selatan. Kalau ada pengaruh Tiongkok, India, Asia dan Arab itu wajar karena di sini mereka berkembang. Bahkan Hindu, Buddha dan Arca-nya masih di dipertahankan,” ujar Fikri.



Politisi Fraksi PKS ini juga menyarankan agar museum sebagai cagar budaya bisa memberikan narasi dan inovasi yang bagus agar pengunjung yang ingin mempelajari sejarah dan budaya. Hal tersebut sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya.

“Ini seharusnya perlu didiskusikan pada instansi terkait, agar masing-masing berusaha untuk berkontribusi dan memfasilitasi supaya budaya kita menjadi lestari kemudian terus berkembang. Jadi esensi dari kebudayaan itu inovasinya dan budayanya, bukan beban. Melainkan adalah investasi bahkan alat untuk kemajuan kita di masa yang akan datang,” pungkasnya.

### **TINJAU WISATA PERKAMPUNGAN TEMATIK**

Kampung Purun sebagai destinasi wisata perkampungan tematik Kota Banjarbaru banyak menghasilkan kerajinan berbahan dasar tanaman purun (rumpun gambut). Mulai dari kipas tangan, tikar, topi, hingga tas dapat ditemukan di area perkampungan yang terletak di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih di Museum Negeri Sumatera Selatan. Foto: Arieti/nvi

“Hasil kerajinan anyaman Purun yang ada di Kampung Purun kini telah diakui kualitasnya, baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Hal tersebut, lantaran hasil kerajinan purun telah diikutsertakan dalam even nasional hingga pameran di luar negeri,” ungkap Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin di Banjarbaru, Kalsel.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, Kampung Purun pada tahun 2016 lalu, pertama kali dicanangkan oleh Lurah Palam yang berinisiatif untuk memaksimalkan tanaman purun yang berlimpah-ruah di wilayah Kelurahan Palam, tepatnya di daerah rawa dan bekas galian.

Awalnya, masyarakat Kelurahan Palam hanya mengumpulkan tanaman purun basah dalam bentuk terikat atau tergulung yang kemudian dijual dengan harga yang relatif murah kepada pengumpul untuk dikirim ke luar daerah. Dan untuk memaksimalkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendeklarasikan Kampung Purun sebagai Desa Wisata Tematik dan merupakan salah satu *landmark* Kelurahan Palam.

“Kami mengapresiasi peran Pemerintah Kota Banjarbaru dan kementerian terkait dalam memfasilitasi dan membantu segala keperluan yang diperlukan masyarakat mewujudkan Kampung Tematik yakni Kampung Purun, seperti mengadakan pelatihan, mengadakan alat penumbuk purun, hingga kegiatan promosi,” ujar Djohar.

● **afr,oji,ayu/es**



Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin saat memimpin Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau Kampung Purun. Foto: Oji/nvi

# Kawal Perkembangan Perekonomian dan Pembangunan Nasional

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke tiga daerah membahas perkembangan perekonomian dan pembangunan nasional tahun 2021.

**T**idak dipungkiri, merebaknya varian delta pada Juli sampai pertengahan September 2021 lalu, memberi dampak terhadap perekonomian pada triwulan III 2021. Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto berharap potensi sumber ekonomi baru melalui penguatan perekonomian dan percepatan pembangunan daerah khususnya di provinsi Jateng, dapat menjadi motor utama pembuka sumber pertumbuhan ekonomi pasca pandemi yang disinergikan melalui orkestrasi kebijakan nasional dan daerah.

“Tren pemulihan ekonomi di Jateng harus terus dikelola dengan baik.

Misalnya melalui penanganan pandemi yang efektif, percepatan program vaksinasi, dukungan terhadap potensi perekonomian daerah, keberlanjutan pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) di Jateng, dukungan kepada UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat, UMKM *Go-Digital* dan *Go-Ekspor* sehingga memberikan dorongan terhadap perekonomian,” ungkap Dito.

Memasuki tahun 2022, Politisi fraksi Golkar ini pun optimis perbaikan perekonomian di Jateng akan terus berlanjut dibandingkan pada tahun 2021. Menurutnya hal ini perlu diupayakan bersama melalui sinergi

dan inovasi dalam mendorong investasi, pengembang sektor pendukung ekspor dan substitusi impor, pariwisata, serta pengembangan infrastruktur di Jateng guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkualitas.

“Pengerjaan berbagai proyek infrastruktur yang sempat tertunda khususnya PSN di Jateng akan memberikan *multiplier effect* secara langsung terhadap perekonomian, lapangan pekerjaan, dan konektivitas antar daerah di provinsi Jateng. Sehingga, momentum pemulihan ekonomi yang terus berlangsung ditambah dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jateng dapat menjadi motor utama pasca pandemi Covid-19,” ungkap Dito.

Meski demikian, Dito meyakini dengan pengelolaan penanganan Covid-19 yang efektif oleh pemerintah. Berbagai indikator perekonomian dini menunjukkan prospek yang optimis bahwa sampai akhir tahun 2021 akselerasi pemulihan ekonomi terus terjadi.

## PERTUMBUHAN EKONOMI DI JATIM MEMBAIK

Di Jatim, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengungkapkan kinerja pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III 2021 tumbuh 3,23 persen *year on year* (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,07 persen yoy. Perekonomian Jatim, sebesar 9,20 persennya masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor, pertanian, kehutanan, perikanan dan konstruksi.

“Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 70,73 persen.



Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Semarang. Foto: Tiarah/ivi





Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi XI DPR RI. Foto: Nadia/rvl

Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian. Sektor ini mengalami kontraksi sebesar 0,91 persen. Begitupun dengan inflasi di semua wilayah pada November 2021 tercatat tetap rendah meski meningkat dibandingkan periode sebelumnya,” tutur politisi PPP ini.

Sementara itu, peningkatan tekanan inflasi juga terjadi di wilayah Jawa. Seluruh daerah di Jawa mengalami kenaikan tekanan inflasi. Pada triwulan IV 2021, inflasi IHK Jawa Timur diperkirakan masih terjaga dan berada pada koridor sasaran inflasi 3,0 persen  $\pm$  1 persen (yoy), dengan kecenderungan lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 terutama dipengaruhi oleh potensi kenaikan permintaan bahan makanan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Secara keseluruhan Amir menilai perekonomian Jawa Timur pada tahun 2022 diperkirakan terakselerasi dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan tren perbaikan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2022 diperkirakan membaik didorong oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, kinerja ekspor yang tetap kuat, pembukaan sektor-sektor prioritas yang semakin luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, serta masih berlanjutnya penyelesaian proyek-

proyek yang terdapat dalam PSN dan Perpres 80 Tahun 2019.

### **DORONG PENINGKATAN DAYA SAING UMKM**

Sementara di Jabar, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mendorong adanya percepatan perkembangan ekonomi di Jawa Barat, salah satunya dengan memaksimalkan peran UMKM. Untuk itu Fathan menilai perlu campur tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk mengarahkan UMKM di Jawa Barat untuk menggunakan sistem digitalisasi.

“Kita mendorong OJK dan Bank Indonesia, (bahwa)

digitalisasi UMKM sangat penting karena marketing, packaging dan lain-lain, daya saing utamanya akan ditentukan oleh digitalisasi. Sehingga kata kunci dari daya saing kita adalah digitalisasi, kalau tidak kita akan ketinggalan jauh dari UMKM lain,” ujar Fathan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Kantor OJK Regional 2 Jabar.

Tak hanya itu, politisi Fraksi PKB tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap laporan perkembangan ekonomi di Jabar yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Ia optimis perekonomian di Jabar pada masa pandemi ini akan cepat pulih dibanding dengan provinsi lainnya.

“Laporan-laporan dari perkembangan UMKM, kemudian pertumbuhan kredit apalagi sektor perumahan cukup membaik. Oleh karena itu kita optimis Jawa Barat tahun 2022 akan mengalami *recovery* lebih awal dari provinsi lain,” yakin Fathan.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II ini juga mengingatkan kepada jajaran OJK, BI dan Kemenkeu, bahwa percepatan perkembangan ekonomi harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap usaha-usaha yang dianggap ilegal, agar tidak merugikan masyarakat, salah satunya kehadiran pinjaman *online* (pinjol). ● tra,ndy,ptd/es



Tim Kunker Komisi XI DPR RI foto bersama dengan mitra kerja di Jawa Barat. Foto: Prima/rvl

# Ciptakan Stabilitas Harga Minyak Goreng

Minyak goreng bisa dikategorikan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap rumah tangga bahkan industri kecil atau pun menengan pun banyak yang membutuhkan minyak goreng.



Foto Ilustrasi: Pedagang minyak goreng di pasar tradisional. Foto: Jaka/rvt

**K**enaikan harga minyak goreng dan ketidakstabilan harganya telah meresahkan banyak kalangan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan harga minyak goreng yang terjangkau bagi rakyat dan stabil. Kesetabilan harga harus memberi

manfaat bagi rakyat tapi di saat yang sama tidak boleh merugikan petani sawit atau pun industri perkebunan sawit.

Tantangan ini harus dijawab bersamaan oleh pemerintah, kebutuhan rakyat terpenuhi, tapi petani dan industri tak boleh merugi. Menanggapi permasalahan pelik ini Wakil Ketua DPR

RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta intervensi harga minyak goreng oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk dilanjutkan. Sebelumnya kebijakan intervensi harga minyak Rp14 ribu per liter berlaku hanya 6 bulan.

“Intervensi harga dalam 6 bulan ini lanjutkan saja. Tapi, kalau dirasa sudah stabil, ya sudah lepas lagi. Nanti kalau enggak stabil, intervensi lagi. Kita dorong untuk lanjut (intervensi harga),” ujar Gus Muhaimin usai menggelar sidak harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara, akhir Januari lalu.

Baginya intervensi harga minyak goreng harus membantu meringankan beban masyarakat. Menurutnya peran pemerintah dibutuhkan saat ini untuk menyeimbangkan harga bahan pokok. “Karena itu, lanjutkan intervensi harga minyak dan gunakan kewenangan pemerintah agar membantu masyarakat tidak menjadi kesulitan karena harga yang tinggi. Semua langkah pemerintah dalam menyangkut stabilitas harga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat supaya tidak mengalami kesulitan,” ucap Gus Muhaimin.

## PERLU KEBIJAKAN SISTEMATIK

Di lain pihak, Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus mempertanyakan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri. Menurutnya angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus,” ujar Sihar di Jakarta awal Februari 2022.



Hal itu dikatakannya, tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (Het) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Sekalipun Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini. Sebagai upaya mensejahterakan lonjakan harga minyak goreng yang sebelumnya melambung tinggi pada akhir 2021 dengan harga Rp20.500 per Kg dan disubsidi menjadi Rp11.500 per Kg.

Sehingga, Politisi PDI-Perjuangan ini menyarankan sebaiknya Pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematis dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Di antaranya melalui upaya Optimalisasi Holding di PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hal itu diyakini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Dengan membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik. Mengingat data pada tahun pada 2020 lalu, hasil produksi CPO dari Holding PTPN mencapai 2,38 juta ton.

“Pertama, optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” tegas Sihar.

Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan *levy* atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi. “Kedua, bukankah BLU-BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) memiliki pilihan untuk menurunkan *levy* atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif,” ungkapnya.

Legislator dapil Sumatera Utara II ini juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat.

## OPTIMALISASI HOLDING PTPN DAPAT MENINGKATKAN KAPASITAS PRODUKSI MINYAK GORENG. BUKANKAH PERAN BUMN TIDAK MELULU Mencari KEUNTUNGAN TAPI JUGA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT?”

Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus. Foto: Arief/mvl



Dia juga menjabarkan tentang struktur industri CPO di hulu lebih kompetitif dibandingkan dengan hilir. Hubungan antara produsen hulu dan konsumen hilir bersifat sangat cair berdasarkan harga pasar.

### MINYAK GORENG MENYANGKUT HAJAT HIDUP RAKYAT

Sihar juga menjelaskan dalam potongan kue CPO, B30 yang nantinya menjadi B40 (biodiesel) sudah tidak dapat diutak-atik. Dari tahun 2019 biodiesel telah memberikan kontribusi sekitar 30 persen dari total bauran EBT. Hal ini tentu membuat porsi CPO tersisa untuk minyak goreng dan produk lainnya tergerus. Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus.

Sementara data juga menunjukkan 68 persen industri CPO terintegrasi dari hulu hingga hilir (end product) dan probabilitas untuk menyediakan B30/B40 dan minyak goreng cukup tinggi. Cabang hilirisasi ini adalah

konsekuensi logis dengan ‘high versatility’ daripada industri sawit. Sehingga Sihar pun mempertanyakan, “Apakah kebijakan saat ini melalui DMO CPO 20 persen domestik yang bertujuan menurunkan harga minyak goreng sudah memikirkan cara lain yang bersifat sistemik?”

Menurutnya, Optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng dengan membeli TBS dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik. Sebagai informasi pada 2020 lalu, produksi CPO dari Holding PTPN mencapai 2,38 juta ton (bisnis.com, 28 Des 2021). Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga mempertanyakan, bukankah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU-BPDPKS) memiliki pilihan untuk menurunkan *levy* atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif. ●eko/es

# Fadli Zon: Bali Siap jadi Tuan Rumah IPU

Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 pada 20-24 Maret 2022 mendatang yang bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia.

**M**enjelang pelaksanaan sidang organisasi Parlemen sedunia tersebut, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan sosialisasi kepada sejumlah media massa nasional untuk menggaungkan penyelenggaraan acara tersebut.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyampaikan penyelenggaraan Sidang Umum IPU memiliki dampak positif. Di antaranya, penguhan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, setelah AS dan India serta memperkuat kualitas demokrasi secara domestik dan global.

Selain itu, meneguhkan kepemimpinan DPR RI dalam meng-*address* isu-isu krusial global yang menjadi perhatian bersama seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, penanganan pandemi dan pasca pandemi, demokrasi dan HAM, perdamaian dan stabilitas global serta isu-isu strategis lainnya.

"*Climate Change* merupakan masalah yang serius, dan parlemen harus mempunyai awareness sesuai dengan fungsinya, seperti membuat legislasi yang mem-*protect* persoalan lingkungan, perubahan iklim serta apa yang menjadi runutan dari *Paris Agreement*," ungkap Fadli Zon.

Fadli menambahkan, pertemuan Sidang Umum IPU 2022 dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerjasama antarparlemen untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Tentunya DPR RI, melalui tugas diplomasi akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia siap membangun dunia yang lebih baik, dengan tata sosial ekonomi dan politik yang humanis dan berkeadilan sosial," jelasnya.

DPR RI telah menjadi anggota resmi IPU sejak tahun 1959. Namun pada tahun 1976, DPR mulai secara rutin mengirimkan delegasinya ke konferensi IPU yang merupakan satu-satunya forum global yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia.

Kehadiran delegasi DPR di dalam setiap pertemuan pun selalu dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya. Forum IPU telah menjadi salah satu platform utama untuk diplomasi parlemen untuk menyuarkan kepentingan nasional masyarakat Indonesia. Seperti perdamaian, demokrasi, HAM, pemberdayaan pemuda, kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan.

## MOMENTUM PULIHKAN EKONOMI DAN PARIWISATA

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menilai kegiatan IPU ke-144 akan memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari pandemi, sekaligus mendatang menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi tantangan pandemi Covid-19 ini.

"Momentum (IPU) di Bali, kita melihat yang terpenting adalah bagaimana kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah mampu mengelola tantangan pandemi Covid-19 ini secara baik, sehingga menjadi pembukaan pemulihan kembali ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata," ucap Putu Supadma.

Menurut dia, pelaku pariwisata dan masyarakat Bali saat ini yakin bahwa Bali sangat siap untuk menerima even



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon. Foto: Rumi/mt





“MOMENTUM (IPU) DI BALI, KITA MELIHAT YANG TERPENTING ADALAH BAGAIMANA KITA MENUNJUKKAN KEPADA DUNIA BAHWA INDONESIA TELAH MAMPU MENGELOLA TANTANGAN PANDEMI COVID-19 INI SECARA BAIK, SEHINGGA MENJADI PEMBUKAAN PEMULIHAN KEMBALI EKONOMI, KHUSUSNYA EKONOMI PARIWISATA,”

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.  
Foto: Andri/mvl

internasional ini. Sebab, Bali telah menerapkan konsep penanganan protokol kesehatan yang baik, sehingga diharapkan dapat dibuka

untuk wisatawan mancanegara.

“Momentum IPU ini adalah momentum yang baik untuk akhirnya pariwisata bisa kembali perlahan membaik di masyarakat akan mendapatkan manfaat seluas-luasnya dari peningkatan ekonomi pariwisata ini,” ungkapnya.

Selain kebangkitan sektor pariwisata, politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan tantangan terbesar saat ini adalah mencapai target-target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*. Oleh karenanya, ini harus menjadi komitmen global untuk dunia menuju ke tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya isu yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan, serta penggunaan energi yang bersih.

Dikatakan legislator daerah pemilihan (dapil) Bali tersebut, filosofi kearifan lokal yang ada di Bali salah satunya adalah Trihita Karana, yakni bagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan yang kuasa, dan manusia dengan alam, ini menjadi satu tolak ukur atau konsep yang mungkin bisa menjadi sumbangsih nyata kepada dunia untuk bagaimana ke depan dapat lebih menjaga bumi dan lingkungan.

“Isu-isu ini diangkat di samping isu-isu yang lain yang berhubungan dengan penggunaan energi yang bersih, dan pada akhirnya bumi dan masyarakat kita betul-betul mendapatkan manfaat yang besar. Dan konsep *green economy* menjadi sangat penting karena ekonomi tetap tumbuh dan ramah lingkungan, serta masyarakat ikut terlibat. Kita mendorong bisa membangkitkan ekonomi dan kepariwisataan, khususnya di Bali dan daerah lainnya. Mudah-mudahan momentum IPU ini ekonomi akan kembali pulih dan pariwisata juga akan kembali baik, dan masyarakat yang pada akhirnya mendapatkan manfaat dari segala kegiatan ini,” katanya.

## AKAN TERAPKAN SISTEM ‘BUBBLE’

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan pertemuan para pemimpin parlemen dunia dalam agenda Sidang Umum IPU ke-144 akan menerapkan sistem *Bubble*. Sistem *Bubble* adalah memisahkan pihak yang terlibat dalam acara itu, mulai dari penonton hingga penyelenggara, dengan masyarakat umum di luar even tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi penularan secara langsung.

Sistem yang digunakan berkaitan dengan protokol kesehatan di masa pandemi itu, jelas Indra, sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penularan varian Covid-19, yaitu omicron.

“Jadi, mereka (para delegasi) masuk dalam satu pengelompokan, tidak boleh ada yang keluar dari gelembung itu. Orangnya sama dalam seluruh rangkaian acara, mulai dari saat tiba di Jakarta, di pesawat, hotel, pun saat acara-acara di gedung saat di Bali. Termasuk, saat kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan berkunjung ke beberapa komunitas UMKM di Bali,” ujar Indra.

Sisi lain, program vaksin *booster* dan upaya lainnya dapat menjadi tapan dan saringan untuk mencegah virus tersebut merebak di negara ini. Sehingga penyelenggaraan IPU di bulan Maret 2022 nanti dapat berjalan dengan aman dan nyaman bagi seluruh pihak, baik di dalam negeri maupun tamu parlemen negara sahabat lainnya yang akan berdatangan ke Bali.

Bali sebagai tuan rumah pertemuan global sendiri telah mencapai target 102,77 persen vaksin dosis pertama dan 91,45 persen vaksin dosis kedua. Secara nasional, capaian vaksinasi Indonesia adalah 89,06 persen dosis pertama dan 62,02 persen dosis kedua. Di sisi lain, program *booster* dosis vaksin Covid-19 ketiga juga tengah digulirkan di Indonesia, bahkan cakupan vaksinasi Indonesia telah melampaui standar WHO. ●ann/es



**DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)**



# I Gusti Agung Rai Wirajaya: Salurkan Bantuan Beras



Anggota DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat. Foto: Ist/nvl

Pandemi Covid-19 masih menghantui masyarakat. Banyak aktivitas ekonomi terdampak virus yang melanda dunia sejak penghujung 2019 lalu. Untuk itu, uluran tangan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

**A**nggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyalurkan bantuan beras 5 kg kepada masyarakat Desa Mengwitani dan Beringkit yang bertempat di Banjar Siladharna, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dalam masa reses Persidangan Kedua Masa Sidang 2021-2022.

I Gusti Agung Rai mengakui kegiatan reses kali ini sedikit berbeda karena sesuai dengan arahan Ketua

DPR RI sekaligus pembina Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani agar setiap anggota turun ke dapil dan ikut membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dari badai pandemi Covid - 19.

“Nantinya beras akan disalurkan bersamaan dengan reses anggota Fraksi PDI-Perjuangan di masing-masing daerah pemilihan dengan total beras sebanyak 2.000 sak di 20 titik di seluruh kabupaten kota di Bali,” ungkap ARW sapaan akrabnya.

Kendati masih dalam pandemi Covid-19, ARW senantiasa

mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu memakai masker.

Untuk kegiatan reses kali ini, Agung Rai Wirajaya mengawali dari Kabupaten Badung, tepatnya Banjar Siladharna, Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi yang bekerjasama dengan Ranting PDI Perjuangan Desa Mengwitani.

Di akhir acara reses, diserahkan 100 sak beras 5 kg bantuan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ditambah dari anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Badung sehingga total yang disalurkan sebanyak 250 sak. Ia berharap bantuan beras ini dapat bermanfaat untuk masyarakat.

“Kami berharap pandemi Covid-19 cepat berlalu dan segera kembali kepada kehidupan *new normal* dan khususnya Bali segera bisa bangkit kembali,” tandasnya. ●ann/es

# Muhammad Fauzi: Berupaya, Realisasikan Program Kerja

Berbagai janji politik yang pernah diucapkan saat kampanye pileg lalu perlahan mulai diwujudkan. Adalah Muhammad Fauzi, seorang Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar merealisasikan berbagai jenis program sepanjang tahun 2021 di Dapil Sulsel III.



Anggota DPR RI Muhammad Fauzi saat menyapa konstituennya. Foto: Ist/nvl

**P**rogram yang direalisasikan oleh Fauzi mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, bedah rumah hingga program bantuan modal usaha, operasional pesantren, desa wisata dan bantuan sembako untuk masyarakat dengan total nilai kurang lebih Rp100 miliar lebih.

Lokasi realisasi program yang dibawanya di Dapil Sulsel III meliputi Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang dan Kabupaten Sidrap. Selain perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, ia juga merealisasikan program padat karya revitalisasi drainase, pengembangan desa wisata hingga bantuan untuk

BUMdes sampai pembagian sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah di tahun 2021 ini meski saya masuk di Komisi V setelah tahun anggaran sudah berjalan beberapa program bisa terealisasi di dapil saya yaitu dapil Sulsel III. Semoga ditahun 2022 nanti saya bisa berbuat lebih lagi untuk masyarakat khususnya di dapil Sulsel III,” ucapnya.

Selama tahun 2021 ini, untuk program padat karya revitalisasi seperti drainase, itu tersebar di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Luwu Utara panjang drainase 900 meter dengan anggaran Rp750 juta. Sementara itu di titik Rantepao-Palopo, panjang 1.050

meter dengan anggaran Rp1,5 miliar, di Belopa-Palopo ada Rp340 meter anggaran Rp400 juta.

Selain itu, program revitalisasi drainase ini juga ada di Kabupaten Enrekang, panjang drainase 1.900 meter anggarannya Rp2 miliar. Sementara di Luwu Timur ada dua titik, pertama di Tarengge panjang drainase yang dikerjakan adalah 500 meter dengan anggaran Rp460 juta dan titik kedua di Tarengge-Kayulangi, panjang drainase 1.290 meter menggunakan anggaran sebesar Rp1.2 miliar.

“Semua pengerjaan program padat karya ini menyerap SDM masyarakat lokal, ini sebagai bentuk mendorong atau membantu pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini,” jelas politisi yang akrab disapa Abang Fauzi ini.

Fauzi menambahkan, dari seluruh program yang terealisasi di dapil Sulsel III juga ada beberapa program saat dirinya masih berstatus sebagai Anggota Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Sosial, BNPB, Kementerian Agama, Badan Pengelolaan Keuangan haji, KPAI, BAZNAS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

“Seperti hunian tetap, operasional pesantren misalnya itu program waktu saya masih di Komisi VIII. April 2021 baru saya ditugaskan partai di Komisi V sampai saat ini. Semua program yang terealisasi ini saya perjuangkan mulai tahun 2020 sampai 2021,” ungkapnya.

Ia berharap, di tahun 2022 ini, bisa berbuat lebih lagi dari tahun sebelumnya untuk masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di dapil Sulsel III. •tn/es



# Jefry Romdonny: Salurkan Bansos Beras kepada Konstituen



Anggota DPR RI Jefry Romdonny saat membagikan bantuan beras kepada masyarakat terdampak Covid-19. Foto: Ist/wni

Anggota DPR RI Jefry Romdonny menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Majalengka, Subang dan Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Jefry mengungkapkan, bantuan berupa beras tersebut merupakan hasil aspirasi pengajuan dari pihaknya selaku Anggota Komisi VIII DPR RI kepada pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

“Bantuan ini kita bagikan di tiga kabupaten yaitu Majalengka, Subang dan Sumedang. Bantuan beras ini merupakan hasil pengajuan saya selaku Anggota Komisi VIII DPR RI

ke Kemensos. Jadi, kalau semisal Majalengka punya lima dapil kita alokasikan semua agar bisa terbagi secara merata ke seluruh wilayah,” ujar Jefry saat menyalurkan bansos di Desa Cibogo, Kecamatan Ligung, Majalengka, belum lama ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menyatakan total keseluruhan bantuan yang dibagikan di Majalengka, Subang dan Sumedang mencapai sebanyak 20 ton.

“Tercatat ada dua ribu penerima untuk masyarakat yang berada di tiga kabupaten itu. Adapun, satu karung berasnya itu seberat 10 kilo yang kalau ditotal keseluruhan jumlahnya ada 20 ton yang kita salurkan untuk tiga kabupaten ini,” ungkap Jefry.

Jefry menjelaskan, kriteria sasarannya penerima bantuan beras difokuskan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 secara khusus lebih spesifik bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Untuk sasarannya sendiri kita lihat dari kriterianya harus yang memang layak menerima bantuan. Saya juga wajib melihat penerima yang idealnya siapa. Penyaluran bantuan beras juga melibatkan tim yang memahami kondisi di wilayahnya masing-masing,” pungkas Legislator dapil Jabar IX ini. ●pun/es

## Lisda Hendrajoni: Dengar Aspirasi Langsung dari Masyarakat

Menyerap dan menghimpun aspirasi dari konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh seorang Anggota Dewan. Namun, sejatinya menyapa konstituen atau masyarakat yang diwakili tidak terbatas pada masa reses saja.

**D**engan mendekatkan diri kepada masyarakat, para anggota dewan bisa mendengar keluhan kesah dari masyarakat yang kelak akan diperjuangkan dalam sidang-sidang di DPR RI. Tak pernah lelah, Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni terus menyapa masyarakat untuk menyerap aspirasi maupun menyalurkan berbagai bantuan program bagi masyarakat di dapilnya.

“Memperjuangkan rakyat miskin itu telah menjadi kewajiban kami, dan juga merupakan tugas konstitusi. Semoga kinerja kami untuk tahun-tahun kedepan akan lebih baik lagi,” ungkapnya.

Lisda yang dikenal sebagai tokoh yang peduli dengan kegiatan sosial ini melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Sumatera Barat (Sumbar).

Lisda memulai perjalanan menyapa masyarakat dengan mengunjungi salah satunya Kabupaten di Pesisir Selatan. Kunjungan itu ia manfaatkan



Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni tak sungkan mampir menghampiri dan mendengarkan keluhan kesah konstituennya. Foto: ist/mv

untuk menyapa, menyerap aspirasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Ada penyerahan sembako, alat bantu untuk penyandang disabilitas. Mulai dari kursi roda, kaki dan tangan palu, alat bantu dengar hingga kacamata serta tongkat yang diberikan kepada para kelompok lansia,” jelasnya.

Setelah itu, Legislator Fraksi NasDem itu, melanjutkan kunjungan ke Kecamatan Linggo Sari untuk memberikan bantuan bedah rumah kepada keluarga Bapak Iskandar, yang tinggal di tengah kebun sawit selama 14 tahun.

Diketahui, keluarga Iskandar yang terdiri dari 7 anggota keluarga tinggal

selama 14 tahun di rumah ukuran 2x4 m, bahkan anak-anaknya tidak ada satupun yang mengecap pendidikan.

“Ini sungguh miris karena Pak Iskandar memiliki 5 orang anak, yang tertua usia 14 tahun. mereka tidur di rumah ukuran 2x4 m, bahkan semua anak mereka tidak satupun yang mengecap pendidikan, karena kemiskinan yang mereka derita. Kami datang memberikan bantuan bedah rumah senilai 20 juta dan sedikit bahan pokok makanan dan meminta supaya anak-anak mereka yang usia sekolah bisa kembali sekolah,” tuturnya.

Lisda berharap, posisinya saat ini bisa terus memperjuangkan segala kebutuhan sosial bagi masyarakat Indonesia. ●rnm/es



## Irmawan: Berupaya **Kembalikan Kejayaan Perkebunan Sabang**

Sabang dulunya merupakan salah satu kabupaten penghasil komoditas perkebunan seperti cengkeh, pinang, kelapa dan lainnya. Akan tetapi akhir-akhir ini produksi komoditas ini mulai menurun bahkan cenderung tidak terdengar sama sekali.

**A**nggota DPR RI asal Aceh Irmawan bersama Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh Ferizal melakukan bimbingan teknis serta audiensi dengan penyuluh dan petani di Sabang.

“Kota Sabang merupakan salah satu daerah pemilihan saya dari 15 kabupaten di Provinsi Aceh dan tentu sebagai perwakilan masyarakat Sabang di Senayan, kami wajib memperjuangkan aspirasi

masyarakat Sabang terutama di sektor pertanian dan perkebunan,” ujarnya.

Irmawan berharap, melalui Bimtek dapat menambah wawasan dan pengetahuan penyuluh, petani dan *stakeholder* lainnya dalam memanfaatkan teknologi untuk peningkatan produksi tanaman cengkeh dan pinang yang sudah eksis di Sabang.

Ia menekankan agar para peserta untuk ikut kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar menjadi Kota Sabang sebagai penghasil utama cengkeh dan komoditas perkebunan

lainya di Provinsi Aceh.

Kepada BPTP Aceh ia meminta untuk terus memberikan bimbingan dalam pengembangan pertanian di Kota Sabang.

“Terakhir kita ingin sampaikan bahwa saya selaku anggota DPR RI asal Aceh berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk terus istiqamah memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh termasuk di dalamnya masyarakat Kota Sabang,” tutup Irmawan.

Sementara itu Kepala BPTP Aceh, Ferizal mengatakan, BPTP Aceh ingin memberikan teknologi spesifik bagi perkembangan pertanian di Sabang sebagai kabupaten perhasil komoditas perkebunan sebagai penopang ekonomi petani. “BPTP Aceh akan mengintervensi petani cengkeh, kelapa, pinang dan komoditas perkebunan lainnya,” ujarnya. ●es/es



Anggota DPR RI Irmawan (tengah) saat memberi penyuluhan pertanian di Sabang. Foto: Ist/riw

# Darizal Basir: Sumbang Sembako untuk Masyarakat Sumbar

Dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat sangat luar biasa. Namun demikian, pemerintah terus berupaya. Sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), anggota DPR RI Darizal Basir menyalurkan bantuan ribuan paket kebutuhan pokok secara bertahap selama masa pandemi Covid-19.

**T**ak kurang dari 1.800 paket sembako disalurkan Darizal untuk masyarakat. “Kami menyadari, kondisi warga saat ini sangat sulit karena terdampak pandemi Covid-19. Terlebih ketika diberlakukan Pembatasan

Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM),” kata Darizal.

Legislator daerah pemilihan Sumatera Barat I ini melanjutkan, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan sosial. Dia berharap bantuan tersebut disalurkan tepat

sasaran dan merata sehingga dapat meringankan beban ekonomi yang saat ini dialami masyarakat.

“Saya sebagai anggota legislatif juga mengetahui bagaimana kondisi masyarakat terdampak ekonomi di masa pandemi ini. Maka saya bantu dalam bentuk penyaluran sembako,” katanya.

Bantuan sembako itu amanah dan sejalan dengan kebijakan partai dengan motto *Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat*. “Apa yang kita lakukan dalam masa pandemi Covid-19 ini adalah amanah, dan sejalan dengan kebijakan Partai Demokrat dalam rangka gerakan nasional peduli berbagi,” ucapnya.

Dirinya berharap, wabah Covid-19 cepat berlalu dan kondisi kesehatan serta ekonomi masyarakat kembali pulih. “Saya juga meminta semua pihak agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid-19,” ajaknya.

Selain kepada masyarakat, bantuan Darizal Basir juga menyasar para kuli tinta. Menurutnya, wartawan juga merupakan profesi yang merasakan dampak ekonomi penerapan PPKM. Perusahaan tempat mereka kerja juga terdampak.

“Semua terdampak, tak terkecuali wartawan dan media. Meski begitu, wartawan dan media selalu intens menyajikan informasi kepada masyarakat. Tetap berkontribusi besar dalam penanganan pandemi Covid-19,” jelas Darizal.

Selain delapan ribuan paket sembako, selama masa pandemi Covid-19, Darizal Basir juga memberikan perhatian pada beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta memberikan beasiswa bagi anak-anak sekolah.

“Sektor UMKM yang terdampak juga perlu mendapat perhatian. Selain itu, pendidikan anak-anak kurang mampu juga harus tetap diselamatkan,” kata Darizal. ●hal/es



Pembagian paket sembako kepada masyarakat dari Anggota DPR RI Darizal Basir. Foto: lst/nvl



## Diah Nurwitasari: Bantu SLB Bandung



Anggota DPR RI Diah Nurwitasari foto bersama salah seorang siswi SLB Bandung. Foto: ist/nvl

Di penghujung tahun 2021 lalu, Anggota DPR RI Diah Nurwitasari mengunjungi dan menyalurkan bantuan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Roudhatul Jannah Soreang, Bandung. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada penyandang disabilitas sekaligus memperingati Hari Disabilitas Internasional.

**K**edatangan Legislator PKS ini disambut hangat oleh Kepala Desa Sekarwangi dan Kepala Sekolah beserta staf SLB Roudhatul Jannah. Dalam kesempatan itu, Diah Nurwitasari menyampaikan bahwa hadirnya PKS di tempat ini adalah sebagai ungkapan rasa cinta.

“Ini semua adalah bentuk cinta kami kepada anak-anak hebat di tempat ini, guru-guru SLB yang hebat dan penyabar, juga para orangtua terutama para ibu yang kuat dan tangguh membesarkan anak-anaknya. Selamat Hari Ibu juga, semoga ini semua berbuah pahala dan surgaNya,” ujar Diah.

“Setiap manusia dilahirkan sempurna, walaupun setiap manusia

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting bagi kita adalah Allah menilai manusia dari kebersihan hatinya, keluhuran akhlaknya, kesehatan visi hidupnya, dan kesempurnaan ketaqwaannya,” ungkap Diah yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI.

Politisi yang akrab disapa Teh Diah ini juga menegaskan bahwa PKS sangat peduli dengan penyandang disabilitas. Dirinya mengungkapkan, ketika penyusunan UU Nomor 8 Tahun 2016 pun, Anggota DPR RI dari PKS menjadi ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas ini.

Teh Diah pun terkesan dengan nama SLB yang disambanginya tersebut. “Saya terkesan dengan nama SLB ini, Roudhatul Jannah yang berarti Taman Surga. Semoga ini menjadi doa juga semangat bahwa penghuni taman surga adalah para malaikat, itu artinya guru-guru di sini adalah para malaikat bagi para anak dan orangtua yang menyekolahkan anaknya di sini,” ucap Diah.

Ia pun berharap, semoga ke depannya para penyandang disabilitas ini mampu diterima dengan baik di masyarakat, mendapatkan hak-haknya, juga kesempatan berkarya dan bekerja demi masa depannya yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Imas Rohiyatiningsih selaku Kepala SLB pun menyampaikan sambutannya. Dirinya mengungkapkan rasa bahagia sekaligus terharu karena baru kali ini SLB-nya dikunjungi oleh anggota dewan dan partai politik.

“Biasanya SLB apalagi SLB swasta seperti kami tidak ada yang memperhatikan, tapi alhamdulillah hari ini ada Aleg PKS yang mengunjungi kami,” sambung Imas menyampaikan terima kasihnya.

Diketahui, Teh Diah didampingi Kang Gun Gun Gunawan selaku ketua DPD PKS Kab. Bandung memberikan bantuan berupa alat-alat peraga pembelajaran beserta sejumlah uang tunai secara simbolis kepada Kepala Sekolah dan siswa SLB Roja. ●hal/es

# Zainuddin Maliki: Salurkan Beasiswa S2 kepada Mahasiswa STAIM Lamongan

Anggota DPR RI Zainuddin Maliki menyalurkan bantuan berupa beasiswa S2 kepada Intiyaul Fitroti lulusan terbaik Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Karangasem Paciran, Lamongan, Provinsi Jawa Timur.



Anggota DPR RI Zainuddin Maliki. Foto: Eno/mvi

**L**egislator dapil Jatim X yang meliputi Lamongan-Gresik ini menyampaikan, sudah sepatutnya para lulusan terbaik wisuda strata satu yang berkeinginan melanjutkan ke jenjang strata dua diberikan beasiswa. Hal ini penting untuk meningkatkan IPM (indek prestasi manusia) Indonesia, khususnya yang ada di Lamongan. Dalam orasi di depan 69 peserta

**PEMBERIAN  
BEASISWA SEJALAN  
DENGAN PROGRAM  
KERJA YANG IA  
PERJUANGKAN  
SELAMA INI**

dan undangan wisuda, Zainuddin mengaku ikut bangga STAIM Paciran memberikan apa yang sesungguhnya dibutuhkan negeri ini yaitu manusia-manusia terdidik dan bermental kuat. Ia mengatakan, maju tidaknya sebuah bangsa bukan ditentukan oleh jumlah sumber daya alam dan jumlah penduduk yang banyak.

“Akan tetapi, maju tidaknya sebuah bangsa bukan ditentukan oleh jumlah manusia yang terdidik dan bermental kuat. Itulah sebabnya ada negara yang miskin sumber daya alam dan berpenduduk sedikit tetapi menjadi negara maju dan sangat kuat,” ungkap eks-Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut.

“Politisi Fraksi PAN DPR RI ini menegaskan pemberian beasiswa sejalan dengan program kerja yang ia perjuangkan selama ini yaitu memperbanyak jumlah manusia terdidik dan bermental kuat. Dalam programnya, Zainuddin memberikan beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA dan SMK dengan beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar).

“Sedangkan di tingkat mahasiswa ada program bantuan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah). Sementara itu untuk S2 ada program BU (Beasiswa Unggulan). “Semoga berkah dan bermanfaat beasiswa yang kita berikan pada putra-putri Lamongan untuk meneruskan jenjang yang lebih tinggi,” pungkas Penasihat Dewan Pendidikan Jatim ini.

●pun/es





## KH Asep Maoshul Affandy : Serap Aspirasi Petani Sukamukti

Anggota DPR RI Fraksi PPP dari Dapil Jabar X yang meliputi wilayah Kuningan, Ciamis, Banjar, Pangandaran, KH Asep A Maoshul Affandy melakukan kegiatan reses bersilaturahmi dengan masyarakat di Kuningan, Jawa Barat.

yang harus menjadi hal utama bagi para petani. Dalam hal ini ia menekankan agar para petani tidak ada ketergantungan akan pupuk kimia.

“Petani kita harus mandiri. Mandiri di sini di antaranya para petani bisa terlepas dari ketergantungan terhadap pupuk kimia. Kita bisa kembali ke pupuk organik. Saya kira pupuk organik lebih baik, tentu dengan keilmuannya. Tanah tidak cepat rusak, unsur hara bertahan lama. Dan sudah barang tentu pupuk organik ini murah dan mudah didapat,” ucap Asep.

Ia mencontohkan, pupuk organik yang bisa kembali digunakan oleh para petani, yakni pupuk kandang. Sebab, dengan rutin dan rajin mengolah pupuk kandang tersebut, kata Kiai Asep, maka pupuk tersebut bisa menjadi pupuk kompos yang berkualitas.

Namun Asep tetap akan memperjuangkan aspirasi para petani di DPR RI, salah satunya terkait adanya kelangkaan pupuk. “InsyaAllah saya akan sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, mengenai keluhan dan harapan masyarakat (petani) ini,” tuturnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Asep Maoshul juga berkesempatan meninjau langsung proses penanaman sejumlah tanaman, di antaranya bawang daun dan seledri. Di lokasi bercocok tanam, ia juga bertemu langsung dengan para petani, sekaligus kembali menampung aspirasi.

“Para petani ini mempunyai harapan untuk pengembangan sarana dan prasarana pertanian, seperti jalan akses pertanian, alat mesin pertanian, dan sebagainya. Aspirasi ini telah kami tampung, dan insyaAllah akan kami sampaikan kepada pihak terkait,” pungkasnya. ●dep/es



Anggota DPR RI KH Asep Maoshul Affandy saat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Sukamukti. Foto: Ist/nvl

**D**alam kesempatan itu Asep bertemu dengan berbagai elemen masyarakat di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana.

Diantaranya yaitu para petani di desa tersebut.

Selain itu ia juga bertemu sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama dari kalangan pesantren. Pertemuan yang berlangsung di ruang serbaguna Pondok Pesantren Riyadul Huda Al-Amin, Dusun Wage 2 Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana itu dilakukan secara terbatas

dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kegiatan ini tak lain dalam rangka menyerap aspirasi dari para petani dan juga unsur lainnya. Sebagai anggota DPR yang membidangi pertanian, saya menampung banyak harapan serta keluhan dari para petani setempat. Salah satunya terkait soal kelangkaan pupuk,” kata Asep.

Atas berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat konstituennya tersebut, Asep mengimbau agar di saat kondisi seperti ini ada kemandirian

# Gusti Ngurah Anom

## Kisah Inspiratif Pemilik Toko Krisna Bali

Gusti Ngurah Anom tak pernah menyangka ia akan menjadi tokoh inspiratif di balik pusat oleh-oleh terkemuka di Bali.

**P**ria yang akrab disapa Ajik Krisna itu merupakan pendiri Toko Krisna Oleh-Oleh, salah satu pusat cendera mata terbesar di Bali. Hampir semua wisatawan tak pernah lupa mengunjungi toko ini ketika melancong ke Bali.

Di balik kesuksesan pengusaha yang kini memiliki 32 cabang toko, siapa sangka Ajik Krisna dahulunya dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu. Pria yang lahir di Buleleng, 5 Maret 1971 itu dibesarkan di Tanguwisia, sebuah desa kecil di Kecamatan Seririt. Ia merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara di keluarga miskin.

“Saya ini di kampung paling miskin. Orang tua petani, ibu pedagang kue. Kami tidak punya rumah. Bangunannya dahulu hanya pakai tanah liat, kalau dipegang itu goyang,” ungkap Ajik Krisna, saat diwawancarai.

Ajik Krisna merupakan anak kecil yang nakal dan sangat lincah. Sedari kecil, ia terbiasa menempuh jarak 5 kilometer setiap hari untuk pergi bersekolah. Kehidupannya ketika beranjak dewasa juga dipenuhi dengan perjuangan. Ia terpaksa berhenti bersekolah ketika SMA karena keterbatasan biaya. Kemiskinan kembali menghantuinya.

Demi bekerja mencari uang, ia pergi meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di kota.

Ia tak memiliki tempat tinggal dan hanya bisa menumpang di *pos security*. Di sana, Ajik Krisna tidur beralaskan batu







Gusti Ngurah Anom di toko Krisna. Foto: Ist/Man

bata sebagai bantal. Ia juga mencari nafkah dengan menjadi tukang cuci mobil di sebuah hotel.

“Sebelum punya Krisna awalnya jadi tukang cuci mobil. Sama sekali tidak punya mobil. Saya cuma mencuci mobil orang di hotel. Dikasih upah syukur, tidak juga tidak apa-apa,” ujarnya. Selang dua tahun, dirinyapun harus berhenti menjadi tukang cuci mobil karena masalah kesehatan. Ia pun pergi menumpang di rumah pamannya yang merupakan pengusaha konveksi.

Ajik Krisna membantu sang paman selama menumpang di tempat konveksi. Suatu hari, ia mencuri perhatian seorang pengusaha bernama Sidharta yang kerap memberi pekerjaan jahitan di tempat sang paman.

Sidharta pula lah yang kemudian mengajarnya banyak hal seputar dunia konveksi. Berbekal ilmu yang didapat, ia mulai membuka usaha konveksi bersama istrinya ketika sudah dewasa.

“Di 2006 sepakat dengan istri bahwa kami ingin ekspansi. Kami survei ke pasar, ternyata di pasar seni Bali, penjualan paling laku adalah produk-

produk kaus. Akhirnya 2006 dibuatlah Toko Krisna pertama,” ujarnya.

Tak hanya menjual kaus dan produk-produk pakaian hasil konveksi miliknya, ia juga menyediakan berbagai macam oleh-oleh khas Bali. Produk tersebut antara lain cemilan, alat musik tradisional, aksesoris, lukisan, serta aneka kerajinan tangan.

Tak disangka, tokonya sangat populer sehingga Ajik Krisna berani membuka puluhan cabang lain dan menguasai bisnis oleh-oleh Bali.

Saat ini Ajik sukses membuka 32 cabang yang terdiri dari toko oleh-oleh dan kawasan wisata. Saat ini Bali dihadapkan dengan pandemi Covid-19 sehingga ia terpaksa harus menutup beberapa usahanya. Namun Ajik Krisna tetap bertahan di bawah tekanan.

“Sekarang total ada 32 outlet, termasuk restoran, *water sport*, *adventure*, *eco village*. Saya tidak menunggu kapan pandemi berhenti, tetapi terus menciptakan inovasi baru,” kata pria 50 tahun itu.

Kini, Ajik Krisna tinggal di sebuah rumah mewah bersama istri dan

keempat buah hatinya. Keluarga Ajik Krisna sangat kuat dalam hal beribadah. Anom tak pernah lupa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa.

Ajik Krisna rutin melakukan sembahyang di pura yang terletak dekat rumahnya. Menurutnya, ibadah merupakan kunci untuk menjaga agar



**SEKARANG TOTAL ADA 32 OUTLET, TERMASUK RESTORAN, *WATER SPORT*, *ADVENTURE*, *ECO VILLAGE*. SAYA TIDAK MENUNGGU KAPAN PANDEMI BERHENTI, TETAPI TERUS MENCIPTAKAN INOVASI BARU**

Gusti Ngurah Anom. Foto: Ist/Man

rezekinya tetap mengalir. “Sesukses apapun kita harus sembahyang, apalagi kita enggak sukses. Orang Bali kalau tidak sembahyang, seringkali habis rezekinya dengan tidak jelas,” tuturnya. ●tn/es

# Perayaan Natal Parlemen Cermin Kekuatan, Kerukunan dan Gotong Royong



Pimpinan serta Anggota DPR RI foto bersama saat malam puncak perayaan Natal Parlemen. Foto: Eno/nvl

DPR RI bersama MPR dan DPD RI sukses menggelar Perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 pada Rabu (12/1/2022) dengan mengusung tema “Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan” sejalan dengan tema nasional Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

**P**erayaan Natal Bersama di Kompleks Parlemen tersebut dihadiri berbagai tamu undangan dari unsur pemerintah seperti kementerian/lembaga, segenap mitra kerja DPR hingga Duta Besar negara-negara sahabat, tokoh agama dan ormas keagamaan diiringi protokol

kesehatan yang ketat dalam seluruh rangkaian perayaan.

Hadir langsung dan memberi sambutan dalam acara tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat Natal untuk seluruh umat Kristiani khususnya yang berada di Kompleks Parlemen.

Sejalan dengan tema Natal Bersama MPR, DPR, dan DPD RI tahun ini yang mengusung tema “Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan”, Puan menyatakan keberagaman Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan untuk mewujudkan kerukunan dan gotong royong umat beragama, bukan menjadi sumber perpecahan.



“Perayaan Natal hari ini membuka sekat warna dan agama di antara kita. Kita hadir pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama merayakan tanpa memikirkan darimana dan latar belakang kita berasal, karena kita masing-masing mempunyai semangat persaudaraan dan gotong royong, sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru ini bisa diisi semangat dalam menghadapi tantangan kedepan,” ujar Puan.

### PERSAUDARAAN ANTAR UMAT

Sementara itu, Ketua Panitia Natal Parlemen Lamhot Sinaga menyatakan Perayaan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila khususnya di

berbeda, tapi kita tetap saudara.” ujar Lamhot.

Panitia Natal Parlemen juga mengangkat perpaduan pakaian adat Nusantara yang bertujuan semakin menegaskan semangat persaudaraan hadir di lingkungan Parlemen di bawah bingkai NKRI. Sekaligus, mencerminkan Parlemen sebagai miniatur bangsa Indonesia yang majemuk namun tetap dapat rukun dan damai dalam memperjuangkan pembangunan Indonesia.

### KULINER UMKM DAN BEASISWA

Di samping itu, Panitia Natal Parlemen sukses menyelenggarakan event “Kuliner UMKM” dengan

MPR, Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan ini,” pungkask Anggota Fraksi Golkar DPR RI ini.

### CINTA KASIH DAN PERSAUDARAAN

Selain itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga turut hadir dalam sambutannya menjelaskan cinta dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa harus menjadi bahan bagi semua pemeluk agama dalam merajut semangat persaudaraan dalam kebersamaan. Ia menuturkan cinta kasih dan persaudaraan adalah ikatan senyawa yang saling menguatkan satu sama lain yang akan menuntun setiap langkah menuju harmoni dan kedamaian.

“KITA HADIR PADA KESEMPATAN HARI INI UNTUK BERSAMA-SAMA MERAYAKAN TANPA MEMIKIRKAN DARIMANA DAN LATAR BELAKANG KITA BERASAL, KARENA KITA MASING-MASING MEMPUNYAI SEMANGAT PERSAUDARAAN DAN GOTONG ROYONG, ...”

Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Eno/mvl



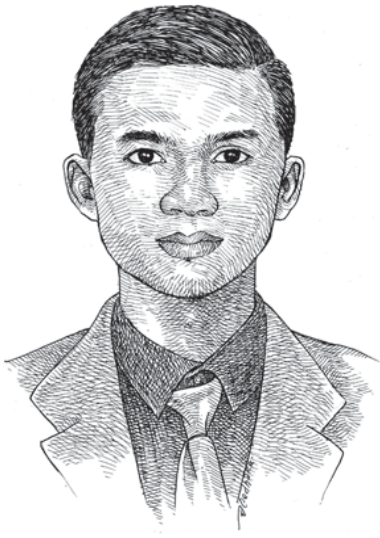
lingkungan MPR, DPR dan DPD RI. Perayaan Natal Parlemen diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun persaudaraan antar sesama umat manusia.

Gerakan persaudaraan sangat dibutuhkan akhir-akhir ini secara khusus perpolitikan Indonesia membutuhkan cinta kasih. Terlebih di masa pandemi Covid-19, kebersamaan dan persaudaraan adalah nomor satu. “Jikalau saya tidak sependapat denganmu, bukan berarti aku membencimu. Kita boleh

mengundang puluhan tenant kuliner Nusantara yang bisa dinikmati secara gratis di Kompleks MPR, DPR, DPD RI. Panitia juga menyerahkan beasiswa kepada 10 siswa berprestasi dari keluarga internal kesekjenan MPR, DPR dan DPD RI masing masing senilai Rp2.500.000.

Selain itu, Panitia membagikan bingkisan Natal kepada pegawai di lingkungan Parlemen mulai dari Pamdal sampai dengan *cleaning service*. “Terakhir, panitia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Pimpinan

“Setelah hampir dua tahun diuji dan ditempa oleh pandemi Covid-19, kita bersyukur bahwa soliditas dan solidaritas kebangsaan masih mampu mempersatukan kita dalam satu bahtera kebangsaan. Saat ini, seiring dengan perbaikan sektor kesehatan dan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, kita semua tentunya berharap perayaan Natal pada hari ini menjadi momentum kebangkitan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,” pesan Bamsuet, sapaan akrab Ketua MPR. ●pun/es



**Oleh: Sofwan**

Tenaga Pengajar di SMK Kesehatan  
Letris Indonesia 2 Pamulang

Semua orang pasti mengharapkan sehat agar dapat melakukan aktivitasnya dengan baik dan dapat memenuhi setiap kebutuhannya. Manusia dipandang sebagai makhluk holistik yaitu makhluk yang utuh dan terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spritual. Unsur ini merupakan aspek yang tidak dapat di pisahkan, jika terdapat salah satu masalah maupun mengalami gangguan dari tiap aspek maka akan menjadi ancaman terhadap aspek atau unsur yang lain. Artinya, manusia mengharapkan sehat secara utuh dan menyeluruh sehingga ke empat unsur tersebut akan berjalan beriringan dan berdampingan untuk tercapainya setiap kebutuhan baik kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri.

# Sehat

## DI MASA KRITIS

**S**ehat merupakan keadaan dimana fisik, psikologis, dan sosial dalam rentang atau dalam keadaan baik dan nyaman, sehat tidak dapat diartikan secara statis, tetapi sehat dapat menjadi fleksibel antara jasmani, rohani, dan sosial. Terkadang orang lupa bahwa dari ketiganya saling berkaitan erat, tidak dapat dipisahkan, dan saling berhubungan. Begitu juga sebaliknya sakit merupakan keabnormalan dari ketiganya di atas.

### APA YANG DIMAKSUD SEHAT DI MASA KRITIS ?

Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Covid-19 semakin meningkat dengan varian-varian barunya, banyak korban yang sekain hari semakin meningkat dengan varian virus yang yang berbeda-beda inilah yang dimaksud masa kritis. Sedangkan sehat di masa kritis yaitu cara kita hidup di masa perkembangan Covid-19 ini.

Era pandemi saat ini, manusia tidak hanya mengalami masalah secara fisik atau biologis yang disebabkan oleh Covid-19, melainkan juga mengalami kecemasan atau gangguan secara psikologis yang diakibatkan oleh pandemi yang belum berakhir, apalagi muncul varian baru yaitu *micron*. Psikologis merupakan keadaan mental yang sering kali orang abaikan.





### KENAPA MENJAGA PSIKOLOGIS SANGAT PENTING ?

Pikiran merupakan kunci semua organ tubuh akan sehat, semakin berfikir positif maka semakin baik sistem imun dalam tubuh seseorang sehingga tidak mudah seseorang untuk terserang penyakit dan bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa seseorang yang berfikir positif dapat memperpanjang angka harapan hidup mereka dan mengurangi resiko terkena penyakit, oleh sebab itu sangat penting untuk menjaga pola pikir yang baik.

Di Indonesia banyak orang-orang hebat tetapi sedikit untuk edukasi tentang psikologis. Bahkan dari awal munculnya Covid-19 sampai saat ini sangat sedikit

yang mpedulikan yang namanya psikologis masyarakat, yang selalu ditekankan oleh pemerintah yaitu menerapkan protokol kesehatan seperti 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19, tetapi lupa dengan psikologis masyarakatnya.

Sampai ini Covid-19 di Indonesia belum berakhir, tercatat 3.161 kasus Covid-19 varian *omicron* di Indonesia, 324 diantaranya terjadi pada usia anak-anak. Dari jumlah tersebut, 1.661 terdiri dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), transmisi lokal 1.247 dan masih dalam pemeriksaan epidemiolog 253 orang. 1.149 orang pasien terinfeksi *omicron* sudah sembuh, dan 5 orang meninggal dengan kasus positif Covid-19 varian *omicron* ([Kompas.com](https://www.kompas.com)).

### TIPS MELATIH PIKIRAN POSITIF

Berfikir positif banyak manfaatnya namun membiasakan diri berfikir positif terkadang sulit untuk dilakukan apalagi sedang menghadapi masalah seperti pandemi saat ini.

Jika sedang ada masalah : pikirkan dua opsi yang bisa dipilih untuk keluar dari masalah yang dihadapi, meski tidak mudah tetapi langkah ini membawa diri anda selangkah lebih maju dibandingkan tenggelam dalam masalah tersebut tanpa mencari jalan. Jika anda dihadapkan pada situasi buruk yang tidak dapat dikendalikan cobalah untuk melihat situasi tersebut dari sisi yang lebih positif. Tak hanya itu, Anda juga disarankan berolahraga dan melakukan meditasi untuk membuat pikiran dan tubuh lebih relaks. Hal ini dapat meningkatkan suasana hati, sehingga anda lebih mudah berpikir positif.

Sebaiknya untuk menjaga agar tetap sehat yaitu harus tetap menjaga psikologis (menjaga pola pikir yang positif) selain itu dengan melakukan perubahan pola hidup (keluar dari zona nyaman) seperti banyak orang mengeluh tidak nyaman ketika menggunakan masker, mengeluh nafas kurang lega, panas, dan lain sebagainya, padahal itu menjadi salah satu upaya untuk menjaga diri dari lingkungan sekitar, menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, bahkan pemerintah sampai mengeluarkan stateman "maskermu melindungiku, dan maskerku melindungimu" hal itu bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya memakai masker. Tidak menggunakan masker yang dianggap nyaman justru beresiko dari tertularnya Covid-19. Maka dari itu, lakukan perubahan, keluar dari zona yang dianggap nyaman untuk sehat di masa kritis.

**RUMAH PENGASINGAN**

*Bung Karno*  
**DI BENGKULU**





Rumah berarsitektur perpaduan Eropa dan Cina yang terletak di pusat Kota Bengkulu, atau tepatnya di jalan Soekarno-Hatta RT. 05 RW. 02 No 02 kelurahan Anggut Atas kecamatan Ratu Samban kota Bengkulu provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang pernah menjadi didiami Presiden Pertama RI Soekarno saat diasingkan penjajah.

Awalnya, rumah tersebut adalah tempat tinggal pengusaha yang bernama Tan Eng Cian. Tan Eng Cian menyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintahan kolonial Belanda. Soekarno menempati rumah tersebut dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Rumah ini berjarak sekitar 1,6 km dari Benteng Malborough. Selama pengasingannya rumah tersebut dipergunakan untuk segala aktivitas baik politik, kesenian dan keorganisasian.

Bangunan Cagar Budaya Rumah Bekas Kediaman Bung Karno dikelilingi oleh pagar dan memiliki halaman luas. Bangunan utama terletak di tengah halaman dan paviliun terletak di belakang bangunan induk. Rumah tersebut terdiri dari teras yang berhubungan dengan ruang tamu dan beberapa kamar serta memiliki teras belakang. Dihias dengan jendela kaca besar di seluruh sisi rumah.

Rumah yang dibangun pada awal abad XX ini berbentuk empat persegi panjang, dengan luas bangunan 162 m<sup>2</sup>. Bangunan ini tidak berkaki dan dindingnya polos. Pintu masuk utama berdaun ganda, dengan bentuk persegi panjang. Bentuk jendela persegi panjang dan berdaun ganda. Pada ventilasi terdapat kisi-kisi berhias. Rumah dengan halaman yang cukup luas ini memiliki atap berbentuk limas.

Di dalam rumah pengasingan ini tersimpan beberapa benda peninggalan Bung Karno yang memiliki nilai sejarah. Benda-benda tersebut terdiri atas benda asli dan benda tiruan yang merupakan saksi bisu yang menemani sang Proklamator dalam menyusun



strategi-strategi perjuangan selama di pengasingan. Meskipun rumah ini tidak terbilang besar, namun pembagian ruang dan penataan benda-benda berharga tersebut cukup rapi dan teratur.

Di sisi kanan terdapat tiga kamar dan di sisi kiri terdapat dua kamar tidur. Pada bagian belakang rumah terdapat beranda. Pada bagian kanan terdapat bangunan memanjang ke belakang, terdiri atas lima petak, di antaranya merupakan kamar kecil atau kamar mandi, sedangkan yang lainnya berfungsi sebagai gudang dan dapur.

•es/es



# Arzeti Bilbina:

## Selalu Menyempatkan Diri untuk Berolahraga

Selain menjaga pola makan dan melakukan perawatan, rupanya Arzeti Bilbina yang merupakan Anggota Komisi IX DPR RI merupakan sosok yang gemar berolahraga.

**D**i tengah jadwalnya yang padat, Arzeti selalu menyempatkan diri untuk berolahraga, yakni bersepeda. Tak jarang, ia pun bersepeda bersama keluarga atau pun teman di sela-sela kesibukannya.

“Hobi saya itu olahraga, sebelum berangkat ke kantor saya pasti olahraga. Kalau hari libur, saya olahraga bareng keluarga dan sama anak-anak,” ungkapnya saat dihubungi **Parlementaria** melalui zoom baru-baru ini.

Arzeti mengaku melakukan aktivitas olahraga pada pagi hari sebelum berangkat ke kantor. Misalnya sebelum berangkat menghadiri rapat, ia biasanya sudah siap berolahraga ringan pada pukul 05.30 WIB.

“Setiap hari pasti diusahakan olahraga, karena kalau olahraga kerja mau sampe pagi bawaanya *happy* terus, muka jadi *fresh*. Makan juga



maunya yang sehat-sehat,” ujarnya.

Olahraga, saat ini dinilai Legislator PKB itu telah menjadi bagian hidup dari sebagian masyarakat di perkotaan maupun pedesaan. Apalagi di tengah pandemi kita dipaksa untuk ikhtiar sehat.

“Aktivitas fisik membantu tubuh untuk menghasilkan lebih banyak

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina. Foto: Doc/man

hormon dopamin sehingga dapat menurunkan hormon pemicu stres, seperti kortisol dan epinefrin, serta menggantikannya dengan meningkatkan hormon norepinefrin sebagai antidepresan,” katanya.

Keseluruhan hormon positif ini bekerja sama menyebabkan perasaan senang dan mengurangi stres, sehingga menciptakan pikiran-pikiran positif.

“Saat sekarang ini kita harus sehat, lihat pandemi aja bikin kita capek, jalan pake maskaer, ada keawatiran ini kan bikin beban tersendiri but kita. Buang hormon

yang jahat di dalam tubuh salah satunya melalui olahraga,” tuturnya.

Melakukan hobi, menurut Arzeti dapat menekan beban pikiran. “Saat di rumah saja, lakukan apa yang kita suka. Hidup di masa pandemi dengan kesempurnaan kita menata diri dan keluarga agar kita terhindar dari depresi dan bisa hidup normal dengan menetapkan protokol kesahatan,” tutupnya. ● rnm/es



# Dilarang Main Hukum dan Main Hakim Sendiri

Indonesia menerapkan asas *equality before the law* yang artinya semua warga negara, tak peduli itu siapa, semua setara di mata hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung asas tersebut.



Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. Foto: Jaka/mvf

Asas *equality before the law* adalah asas dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya, *equality before the law* mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman dalam cuitannya di alin twitternya menekankan, karena Indonesia menganut asas *equality*

*before the law*, maka dilarang main hukum dan main hakim secara semena-mena. Menurutnya apa pun jabatannya, tidak dibenarkan memperlakukan hukum secara semena-mena.

“Karena NKRI adalah Negara hukum maka dilarang main hukum dan main hakim sendiri. Presiden, menteri, gubernur, bupati atau wali kota, kades, polisi, jaksa, rakyat bahkan hakim sekalipun dilarang main hukum dan main hakim sendiri. Bikin hukum

dan angkat diri sendiri jadi hakim,” tandasnya.

Hukum harus melahirkan keadilan, tapi ironisnya masih ada yang beranggapan bahwa praktik hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dia amat menyayangkan hal tersebut yang selalu saja jamak terjadi. “Mengenai keadilan, kalau rakyat salah, langsung ditangkap, dipenjara, dan dijebloskan ke bui. Tapi kalo pejabat yang salah, dibilang salah data, ucap, dan langsung minta maaf. Perkara selesai. Adil kah ini?” keluh Benny.

Jauh sebelum diterapkan dalam konstitusi negara, konsep *equality before the law* sudah memiliki sejarah yang panjang. Jika dilihat dari perjalanan historisnya, konsep tersebut sudah ada dalam kitab-kitab keagamaan. Dalam perjanjian lama, tepatnya di Kitab Bilangan Bab 15 ayat 15 dan 16 diterangkan bahwa manusia sama di hadapan Tuhan.

Kemudian, dalam Al Qur’an surah Al-Hujurat ayat 13 juga diterangkan konsep egalitarian, yakni persamaan antara sesama manusia, baik dari jenis kelamin, bangsa, suku, dan keturunannya. Beranjak dari kitab suci, konsep *equality* telah ditemukan di masa Dinasti Zhou (1045 SM--256 SM). Xia Zhang menerangkan Guang Zhong, seorang filsuf di masa Dinasti Zhou mengungkapkan bahwa negara akan menjadi tatanan yang besar jika raja dan rakyat mematuhi hukum, tidak peduli seberapa besar dan kecilnya mereka.

Menurut Guang Zhong jatuh bangkitnya negara bukan bergantung pada raja, tetapi bergantung pada konsepsi atau sistem hukum yang mengatur raja secara ketat. Beberapa ratus tahun berselang, konsep kesetaraan terdengar di Yunani, pada tahun 431 SM, tepatnya dalam pidato pemakaman Pericles. Thucydides dalam Sejarah Peperangan Peloponnesia menuliskan bahwa pidato tersebut mengatakan hukum memberikan keadilan yang sama bagi semua orang dalam perbedaan pribadi mereka. ●eko/es





Inter-Parliamentary Union  
for democracy for everyone.

# The 144<sup>th</sup> IPU

(Inter-Parliamentary Union)

**Assembly &  
Related Meetings,  
Nusa Dua, Indonesia,  
20-24 March 2022**

